



PERUBAHAN KEDUA **RENSTRA TAHUN 2019-2024**

**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN**



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA MADIUN
JL. TIRTA RAYA NO. 15**

KATA PENGANTAR

Ruji sakti kami persembahkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karun-Nya sehingga Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan Tahun 2019-2024 dapat terselesaikan.



Dengan adanya Perubahan Kedua Rencana Strategis ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tujuan, sasaran, kebijakan program kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, yang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, peran serta seluruh aparat/pegawai dan Dinas/Instansi terkait dan masyarakat sangat diharapkan, sehingga berhasil terlaksananya program kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan terpenting pada aktifitas serta dukungan koordinasi dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, Swasta dan Masyarakat.

Kami berharap bahwa Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan Tahun 2019-2024 masih terdapat banyak ketertarikan. Untuk itu masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di waktu yang akan datang. Semoga Dokumen Perubahan Kedua Rencana ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Maret 2023

**KEBANGSAAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA MEDAN**



L. MUSTHOFA MANSUR

Pejabat TLJ

NIP. 19630207 19822 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
SAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud Dan Tujuan	15
1.4. Sistematika Penulisan	15
SAB II	20
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN ROTA MADURA	20
1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	20
1.2. Sumber Daya	24
1.3. Kinerja Pelayanan	28
1.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dsd	43
SAB III	46
PERMASALAHAN DAN ISO- TSU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	46
1.2. Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	46
1.3. Itu Itu Strategi Nasional Provinsi Dan Daerah	102
1.4. Tolaklah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi	106
1.5. Perwujudan Itu Itu Strategi	107
SAB IV	112
TUDUH DAN SASARAN	112
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	112
SAB V	118
STRATEGI DAN ARUH KEBERAKSIAN	118
SAB VI	125
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENYAJIANN	125
SAB VII	152
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	152
SAB VIII	164
PENUTUP	164

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	SOP Dinas Kelautan Perang dan Pertanian	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan	14
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Peralatan	18
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja	19
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Perubahan	41
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Penerimaan	10
Tabel 2.7	Perubahan Anggaran dan Realisasi Penerimaan	15
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi DPD	60
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendukung DPD	62
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPD berdasarkan ukuran ROSTRA beserta faktor penghambat dan pendukung keterbatasan penerapannya	67
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	68
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan	100
Tabel 5.2	Perubahan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Strategi dan Arah Kebijakan	109
Tabel 6.1	Kelompok Program Pokok	111
Tabel 6.2	Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	113
Tabel 7.1	Indikator Kinerja mepacu pada Tujuan dan Sasaran RPMD	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	1. Segi Aca Perencanaan.....	8
Gambar 1.2	Alur Keterkaitan Dokumen RTRM: Foto Maksud Tahun 2009-2024 dan Rencana Strategic Peringkat Daerah Tahun 2019-2024.....	18





BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen RPJMD juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Penguat Daerah, Inisiatif Penguat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regional dan kerangka pendanaan yang bersifat induktif.

Seiring dengan perkembangan kondisi dan dinamika pembangunan di berbagai level pemerintahan, dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 342 dicantumkan bahwa (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan RPJPD sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri no; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa subsektor yang dimaksudkan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri no; dan c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, perubahan politik, krisis ekonomi, konflik sosial lainnya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila: a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Penyusunan rencana pembangunan daerah dapat dijabarkan berupa:

- i. RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN Nasional;
- ii. RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program RPJPD, lintas RPJPD dengan memperhatikan RPJPN Nasional.

Sama seperti proses penyusunan P-RPJMD, proses penyusunan perubahan kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan 2019-2024 meliputi berbagai hal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2017 yang berprinsip pada empat hal. Pertama, Integratif, yang menunjukkan bahwa perubahan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; Kedua, Partisipatif yang berarti bahwa dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan ini melibatkan Kepala Dinas bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; Ketiga, komprehensif, yang menunjukkan bahwa dokumen Perubahan Kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan ini harus mengintegrasikan dengan visi dan Perubahan RPJPD Kota Medan; dan terakhir berprinsip pada keterbukaan yang berarti bahwa perubahan Kedua Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan ini

memiliki berbagai hak intelektual dan paten yang dimiliki Kota Medan, sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan Kota Medan maupun Provinsi Jawa Timur, dan nasional serta Internasional).

Rencana DPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Atas dasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, Kode Etik dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 550-5849 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perubahan Kualifikasi, Kode Etik dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah dapat dilakukan dengan menyesuaikan nomenklatur nama DPD, SDTK, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota serta indikator yang perlu dicantumkan khususnya yang menyangkut urusan pada Dinas Keluhan Pengan dan Pertanian Kota Medan. Dengan demikian setiap DPD di Kota Medan perlu melakukan perubahan sesuai pada dokumen Rencana Strategi untuk mencapai target dan sasaran DPD yang mengacu pada Visi Misi Kota Medan yang ada pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, selanjutnya terdapat tiga alasan Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2019-2024 yang meliputi:

- I. Perubahan regulasi dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 menjadi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024. Bertujuan dengan target dan ketiduklaiman pendapatan yang terdapat dalam RPJMD tingkat nasional. Diarahkan RPJMD Kota Medan masih mengacu pada RPJMN 2019 – 2024 maka perubahan RPJMD tidak dilakukan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat perbedaan mendasar dari kedua PP tersebut diantaranya adalah perbedaan

dari struktur APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Secara efektif PP tersebut berlaku untuk APBD 2021.

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ii. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5000 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Penyuktarian Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya peraturan tersebut telah dilakukan Perubahan dan peraturan Daerah Kota Madaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kemitraan Pangan dan Pertanian Kota Madaya Tahun 2019-2024.

E. Hasil evaluasi Dokumen Rencana menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

a. Substansi Dokumen Rencana

Substansi Dokumen Rencana 2019-2024 sebelum perubahan, belum memuat arah kebijakan tahunan dan spesifik, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan APBD belum berfokus dengan jelas. Selain itu, arah kebijakan belum secara spesifik menjelaskan dan mengaitkan dengan masing-masing strategi pembangunannya. Penurunan isu strategi dilakukan perubahan. Perubahan tersebut merupakan langkah dan reformasi dari berbagai isu strategi yang saat ini sedang berkembang sehingga akan memudahkan untuk memusatkan berbagai strategi dan prioritas pembangunan dalam perubahan Rencana.

b. Capaian Kinerja

Beberapa target kuantitatif dan sasaran OPD khususnya terkait urusan pangan, pertanian dan perikanan, untuk target tahun 2020 sampai 2024 perlu disesuaikan. Fokus utama evaluasi Rencana strategis untuk tahun

2018, hal ini dikarenakan RPJMD Kota Medan diadopsi melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2018 tertanggal 28 Oktober 2018. Sehingga secara efektif target operasi dalam Perubahan Rencana Jangka Tahun 2020-2024. Sedangkan tahun 2019, masih menggunakan target pada Rencana periode sebelumnya.

Perubahan Kota Rencana Strategi Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 5 tahun, yang memuat Tujuan, Tujuan, Strategi, arah kebijakan, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pondsian Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Medan dengan mengacu dan memperhatikan Perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2019-2024.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari Tingkat Nasional hingga Provinsi dan dari Tingkat Provinsi ke Tingkat Kabupaten/Kota. Seperti pada Gambar 1.1 bawah ini.

Gambar 1. 1. Ragn Rn Perencanaan



Dari gambar di atas maka secara ringkas dapat dijelaskan bahwa RPPF Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKR. Dari tingkat RA, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJMD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RRPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman

perencanaan RPSPD Kota, RPSPD Kota, dan RPSPD Kota. Dengan adanya Perubahan RPSPD Kota Medan, maka menjadi pedoman untuk Perubahan Rencana Dasar Tatahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

1.1. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Rencana Dasar Tatahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Bertas Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1958 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dari Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 48, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 303);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pendidikan dan Tinggi Jawab Keuangan Negara (Lambiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lambiran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

tersebut kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Pembanguan Daerah di Kawasan Gresik - Bangkalan - Pajajaran - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selinger Widi dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4647);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dehromentasi dan Tugas Pembantuan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pemetaan Ruang (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemergian Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5127);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5124);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2018-2025;
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembantuan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2008 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
40. Peraturan Kementerian dalam Negeri (Permenagri) Nomor 90 Tahun 2016 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 503-508 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Perubahan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2025;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2021;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
45. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 55 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2009-2025 (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 12);

43. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 86 Tahun 2009 tentang Sistem Pembiayaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 4/E);
44. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2010-2030 (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 1/E, Tambahan Lampiran Daerah Kota Medan Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 1/C);
46. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lampiran Daerah Kota Medan Nomor 48);
47. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2019-2024 (Lampiran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 13/D);
48. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
49. Peraturan Walikota Medan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Ketidukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Medan.

1.3. Maksud Dan Tujuan

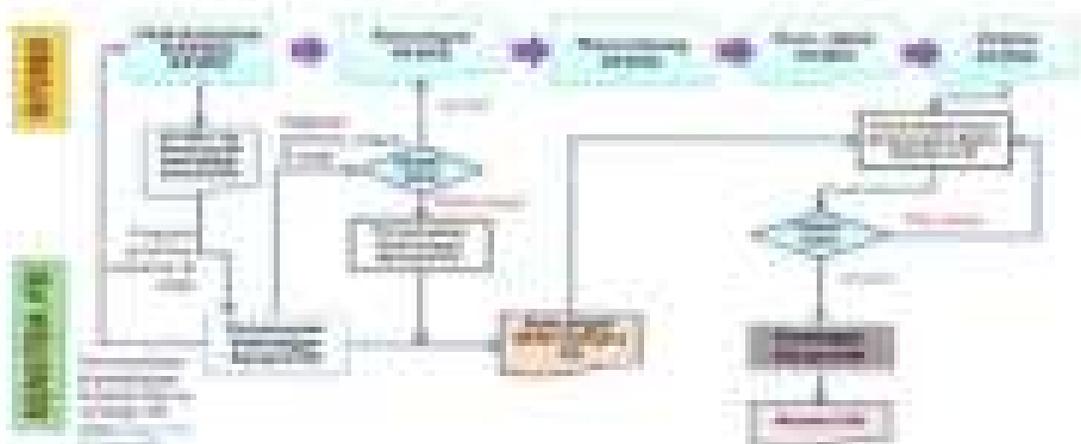
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Rencana PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta nilai-nilai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang diurus oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappenas) Kota Medan.

Rencana Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, mision, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Usaha Pemertahan RPP dan/atau Usaha Pemertahan pilhan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategi Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategi Kementerian atau lembaga pemerintah non Kementerian untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategi PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Rencana PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber daya.

Hubungan nyata P-RPMD dan P-Rencana Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Medan. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah.



Sumber: Kementerian, 2017

Gambar 1. E-Link Keterkaitan Dokumen RP/RMD Kota Medan Tahun 2018-2024 dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2018-2024

Selanjutnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, membuat dan penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai dokumen yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kota Medan Perjan dan Pertanian Kota Medan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang, rencana pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai kegiatan pembangunan regional dan daerah dengan visi dan misi kepada daerah yang ingin dicapai. Adapun metode penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategi :

1. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun dan sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan sesuai dengan pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun untuk jangka waktu lima tahun ;
2. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun ;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun ;
4. Mengjadi Tolak ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi
5. Untuk mempertajam tujuan sasaran, arah kebijakan program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun dalam jangka menengah ;
6. Untuk dasar penilahan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madun yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
7. Untuk menyesuaikan indikator Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-9889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kualifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Selain itu tujuan diadanya Perubahan Kedua Rencana Strategi ini adalah :

1. Sebagai Pedoman dan tolak ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan ;
2. Pengendali pencapaian misi indikator kinerja ;
3. Mengamati ketahanan dan kapasitas untuk pemenuhan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang ;



4. Menjamin tercapainya pengoptimalan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan ;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinergisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Medan.
6. Dokumen disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan prita kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan ;
7. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perencanaan Kerja Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Perencanaan Rencana Strategis yang berisikan pengertian mendasar tentang rencana, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan. |
| Bab II | Gambaran Pelayanah Perangkat Daerah
Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, sumberdaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan |
| Bab III | Pemaksimalan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang identifikasi pemaksimalan lembaga-lembaga tugas dan fungsi pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masalah visi, misi dan program Rencana Kerja dan Hasil Utama Daerah Tahun yang termuat dalam P-RKPD, masalah isu strategis Kementerian Pertanian (sektor pertanian, pangan dan peternakan), Kementerian Kelautan dan Perikanan, masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dan Rancangan Lingkungan Hidup Strategis |

- Bab IV** Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang perubahan tujuan dan sasaran Dinas Kependidikan, Pengajaran dan Pertahanan.
- Bab V** Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang perubahan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangkaian kebijakan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai.
- Bab VI** Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang label-label program dan kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub-kegiatan, dan target kinerja program serta pendanaannya.
- Bab VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Usaha
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Kependidikan, Pengajaran dan Pertahanan Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran P-RPD.
- Bab VIII** Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA MADURA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madura Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madura Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan walikota nomor 22 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madura. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madura perlu suatu mekanisme manajemen pada unit organisasi yang terdiri dari bidang-bidang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Susunan Organisasi Dinas terdiri dari ;
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu : Sekretaris
 - c. Unsur Pelaksana :
 - 1. Bidang Ketahanan Pangan ;
 - 2. Bidang Pertanian ;
 - 3. Bidang Perikanan ;
 - d. UPD ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.



- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang-bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas :

- a. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ;
- d. pelaksanaan pembinaan UPTD ; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat teknis-manajerial yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

2. Sekretariat

Mempunyai Tugas :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program kegiatan, pelayanan administratif dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang urusan internal;
- c. pengelolaan administratif umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan ketumuhan, protokol dan kerohanian di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan administratif dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administratif keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;



- g. menyusun rencana program, pelaksanaan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prosedur di lingkungan Dinas;
- h. menyusun rencana program, pelaksanaan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kebidanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris terdiri dari atas 1 Sub Bagian dan 1 Sub Koordinator sebagai berikut :

3.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- d. melakukan urusan ketumuhan, protokol, upacara dan rapat dinas;
- e. melakukan urusan pengadaan tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengakhiran dan perawatan barang-barang inventaris sosial termasuk peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
- g. melaksanakan administrasi dan pembukuan gaji pegawai;
- h. mengkoordinasikan dan mengontrol bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan penguraian anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- i. menyusun rencana program, melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi sedang dan berat prosedur di lingkungan Dinas;
- j. menyusun rencana program, melaksanakan pengadaan/pemeliharaan sarana di lingkungan Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang bersifat kebidanan yang diberikan oleh Sekretaris.

3.2 Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegowalan

Mempunyai Fungsi :



- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendanaan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta penjabarannya di lingkungan Dinas;
- d. menyusun, mendapat dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pemantauan, pengembangan dan peningkatan Bidang Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas urusan Ketahanan Pangan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengkajian sumber daya ekonomi untuk ketahanan dan kemandirian pangan;
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengembangan, dan peningkatan diversifikasi ketahanan pangan;
- d. Peningkatan kemandirian dan pengarusahan ketahanan pangan;
- e. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengujian dan pemeliharaan lahan dan persawahan di Bidang Ketahanan Pangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator sebagai berikut :



3.1 Sub Koordinator Ketersediaan Dan Pengelolaan Komoditas Pangan Mengapung

Mengapung Pangan |

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Ketersediaan dan Pengelolaan Komoditas Pangan;
- b. Melakukan pengkajian, identifikasi, survei dan rencana kebutuhan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka rencana penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- d. Melakukan penyediaan infrastruktur lembaga pangan, lantai jemur, infrastruktur pendukung kemandirian pangan lembaga dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik;
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pengelolaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan koordinasi pengelolaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor;
- h. Memastikan penyediaan informasi harga pangan dan rencana bahan makanan;
- i. Melakukan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- j. Memastikan pemukiman pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Memastikan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko-toko Indonesia;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan;
- m. Memastikan penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal;
- n. Memastikan penyediaan cadangan pangan;
- o. Memastikan pemeliharaan cadangan pangan; dan



- a. Melaksanakan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala.

3.2 Sub Koordinator Pengendalian dan Keamanan Konsumsi Pangan

Mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Pengendalian dan Keamanan Konsumsi Pangan;
- b. Melaksanakan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita Per Tahun;
- c. Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat dalam Pengendalian dan Keamanan Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- d. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun;
- e. Melaksanakan Tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

3.3 Sub Koordinator Keamanan dan Keragaman Pangan

Mempunyai Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan di Sub Koordinator Pengendalian Keamanan dan Pengawasan Keamanan Pangan ;
- b. Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pola ketahanan dan keragaman pangan;
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keamanan pangan;
- d. Melaksanakan pengujian, pengujian, dan penyediaan cadangan pangan pada keamanan pangan;
- e. Melaksanakan pengujian keberagaman keamanan pangan segar;
- f. Melaksanakan Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. Melaksanakan Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- h. Memberikan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ;
- i. Melaksanakan Penyediaan Sensus dan Praratana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan ;



1. Melakukan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

4. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengabdian Bidang Pertanian. Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pertanian;
- b. pelaksanaan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pemukiman, dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan pendidikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian, pemukiman dan kesehatan hewan, pengabdian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pertanian terdiri dari 3 (tiga) Sub Koordinator sebagai berikut :

4.1. Sub Koordinator Budidaya, Pemukiman dan Sarana Pertanian

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Budidaya, Pemukiman dan Sarana Pertanian;
- b. Melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokal;
- c. Melakukan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian ;
- d. Melakukan pendampingan petani budidaya pertanian melalui berbagai produk pertanian;
- e. Melakukan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B , kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B;
- f. Melakukan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B;



- g. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program pendukung pertanian lainnya ;
- h. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani ;
- i. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani ;
- j. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam (peti) ;
- k. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air ;
- l. Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya ;
- m. Melakukan tugas lain yang bersifat teknis yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

4.2 Sub Koordinator Penyuluhan, Pengendalian dan Penguatan Binaan Pertanian

Mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan Superluhri pada Sub Koordinator Penyuluhan, Pengendalian dan Penguatan Binaan Pertanian;
- b. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa/kelurahan ;
- c. Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa/kelurahan ;
- d. Melakukan pembinaan dan pendampingan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petani ;
- e. Melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian ;
- f. Melakukan pembentukan badan usaha milik petani ;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian organisasi penggerak tani (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- h. Melakukan pengawasan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- i. Melakukan pembinaan dan pendampingan penyediaan sarana perlindungan tanaman alami (nori kimia).



- j. Melakukan pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana perimbangan layanan ahli untuk peningkatan kualitas produksi ternak;
- k. Melakukan pemogohan, pemogohan ketubuhan lahan, dan gangguan usaha layanan pangan, hortikultura, dan perkebunan ;
- l. Melakukan pemanggulangan jasa-bencana alam bidang layanan pangan, hortikultura dan perkebunan ;
- m. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian.

4.3. Sub Koordinator Peternak dan Kesehatan Hewan

Mempunyai Fungsi :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Koordinator Peternak dan Kesehatan Hewan;
- b. Melakukan Pelayanan Kesehatan Hewan yang meliputi Imunisasi, pemogohan, rekayasa, pengobatan penyakit dan penanganan kasus penyakit pada ternak besar, ternak kecil dan unggas;
- c. Melakukan pemogohan penyakit hewan menular dan pengawaban pelaksanaan pemanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota serta pendataan dan pertukaran sumber data dan informasi wabah;
- d. Melakukan bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan), pengamatan, pemetaan, pencatatan, pelaporan kejadian dan pemanggulangan penyakit hewan serta pelaksanaan penelitian epidemiologi penyakit hewan;
- e. Melakukan koordinasi pemberian rekomendasi dan usaha praktik dokter hewan mandiri, praktik dokter hewan jenjang dan klinik hewan sesuai pedoman daerah yang berlaku;
- f. Melakukan pengawasan terhadap prosedur obat hewan di toko peternakan obat/poultry shop/petshop/tempat praktik hewan;
- g. Melakukan pengawasan dan pemertasaan atas prosedur bahan produk obat hewan (jagung sapi, daging ayam, susu dan telur);



- B. Melakukan pemilihan dan pengawesan profil hygiene sambal pada produsen dan tempat penjualan Produk Asal Hewan serta monitoring penetapan persyaratan hygiene, senkas pada unit usaha Produk Asal Hewan yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
- C. Melakukan identifikasi, inventarisasi, pengawasan penanganan standar mutu, pengawasan produk, pendirian, penggunaan, pengujian dan/masih pemetaan dan kesehatan hewan (kewan) serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmanet).
- D. Melakukan persiapan bahan-bahan produksi pakan, bahan baku pakan ternak, prosedur teknologi pakan ternak, standar mutu pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak.
- E. Melakukan persiapan bahan-bahan produksi, penggunaan, pendirian, pemenuhan pakan jala, pakan fermentasi, pakan tambahan dan pengam (additive dan agriemer).
- F. Melakukan pemantauan dan pemenuhan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan serta tindakan di bidang peternakan.
- G. Melakukan Penyusunan data populasi ternak dan informasi pasar.
- H. melakukan pengawasan pendirian bahan pakan/pakan, beres/bidn hijauan pakan ternak.
- I. melakukan pengawasan pendirian beres/bidn ternak dan hama penyakit tumbuhan, bahan pakan, pakan.
- J. Melakukan pengujian mutu beres dan bidn ternak.
- K. melakukan pengawasan pendirian dan sertifikasi beres/bidn ternak.
- L. melakukan pengawasan pendirian beres/bidn ternak dan HPT, bahan pakan/pakan.
- M. Melakukan pengendalian produksi beres/bidn ternak dan hijauan pakan ternak.
- N. melakukan pengawasan produksi beres/bidn ternak dan hama penyakit tumbuhan, bahan pakan/pakan.
- O. melakukan pengujian beres/bidn ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.
- P. melakukan pengujian hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain.



- m. Melakukan tugas lain yang bersifat kehumasan yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan Bidang Perikanan. Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Perikanan;
- b. pelaksanaan budidaya, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;
- e. pelaksanaan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- g. pengorganisasian kegiatan lingkungan perikanan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kehumasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perikanan terdiri dari 2 (Dua) Sub Koordinator sebagai berikut :

B.1. Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Mempunyai Fungsi :

- a. melakukan persiapan bahan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- b. menyusun rencana kegiatan Sub Koordinator Perikanan Budidaya dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- c. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional Sub Koordinator Budidaya Perikanan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan termasuk sarana prasarana perikanan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan penyediaan teknologi perikanan, budidaya dan sarana prasarana perikanan;



- e. menyiapkan bahan perumusan pengawasan mutu benih dan bibit, pakan ikan, obat ikan dan bahan baku;
- f. menyiapkan data dan informasi statistik perubahan budidaya dan perikanan umum, serta sarana prasarana perikanan;
- g. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dalam rangka pemberian pelayanan sumber daya perikanan umum dan ikan;
- h. melaksanakan konservasi, rehabilitasi dan mitigasi bencana alam sumber daya ikan beserta ekodiversitasnya;
- i. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya ikan serta sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- j. melaksanakan penyediaan masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perubahan-perubahan perikanan;
- k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan nasional kelompok pembudidaya, kelompok masyarakat pengawas dan perikanan umum dan sarana prasarana perikanan yang diperlukan;
- l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan dan fasilitas usaha perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan teknologi perikanan budidaya dan sarana prasarana perikanan yang mendukung;
- n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas produksi dan investasi perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan yang diperlukan;
- o. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya serta sarana prasarana perikanan;
- q. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi ekspor/impor hasil dan benih ikan;
- r. mengumpulkan dan mengorganisir data sebagai bahan koordinasi dan pemberian operasional Sub Koordinator pengkajian sumber daya ikan;
- s. melakukan penyajian bahan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nuffah perikanan;



- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Koordinator Kualitas Perikanan dan pengolahan sumber daya ikan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.3 Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
Memiliki fungsi :

- a. menyusun program kerja pada Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengolahan produk perikanan dan pemasarannya;
- c. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. mengelola data pengolahan dan pemasaran;
- e. mentarakan rekomendasi perikanan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- f. memfasilitasi pemasaran dan penyempurnaan prosedur kelulusan dan perikanan;
- g. melaksanakan pengawasan bahan pengawetan penerapan manajemen mutu seperti atau hazard analysis critical control di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- h. melaksanakan persiapan bahan dan koordinasi pembangunan dan pengolahan pasar ikan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Koordinator pengolahan pemasaran;
- j. melaksanakan penyuluhan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. UPTD

UPTD memiliki fungsi :

- a. Memastikan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang terlewat;



- b. Melakukan tugas lain yang bersifat kehumasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelempok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah orang dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.1. Tugas Pokok :

Menyusun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan mempunyai tugas pokok "Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana ketetapan lokal di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan ;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan ;
- c. Pemantauan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan ;
- d. Pelaksanaan Perizinan UPTD ;



- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat administratif yang diberikan oleh Walikota.

3.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Maduk Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Maduk Nomor 26 tahun 2003 tentang Keputusan Gubernur Organisasi Dinas Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Maduk, Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Maduk dipimpin oleh pejabat Eselon II yaitu Kepala Dinas yang dibantu oleh 4 pejabat Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Kelautan Perikanan, Kepala Perikanan dan Kepala Bidang Perikanan.

Setiada terdiri dari 1 unit bagian dan 1 sub koordinator, sedangkan masing-masing bidang terdiri dari 3 sub Koordinator. Adapun Bagai Struktur organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Maduk

3.2. Sumber Daya

Dalam gambaran umum sumber daya yang dipertimbangkan adalah meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.



3.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, dapat digambarkan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah pejabat struktural dan eselon IV hasil penyusunan yang telah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan sebanyak 15 orang pejabat.
- b. Jumlah pegawai sebagai unsur pelaksana tugas pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan 3 orang
- c. Fungsional murni : 5 orang
- d. Tenaga NFL/Kontrak : 5 orang
- e. Tenaga Iqbalan : 40 orang
- f. THL / TB : 3 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1. SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan

No	Jabatan	Jumlah	
			Pegawai
1.	Kepala Dinas		1 orang
2.	Sekretaris		1 orang
3.	Kepala Bidang		3 orang
4.	Koordinator		1 orang
5.	Sub Koordinator		9 orang
6.	Ka UPTD BPH		
7.	Koordinator TU UPTD BPH		
8.	Profesional		5 orang
9.	Fungsional		5 orang
10.	Tenaga Kontrak		5 orang
11.	Tenaga Iqbalan		40 orang
12.	THL / TB		3 orang
	Jumlah		73 orang

Tabel 3. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Ruang

	Kelamin	Pendidikan	Spesialisasi	Ruang
--	---------	------------	--------------	-------



Disusun oleh: abdulrahman@medan.go.id

Kategori Keahlian	Pendidikan		Bel. Asing		Jumlah Mahasiswa/Total Keahlian		Mentor / Guru / TM LTR
	D1	D2	D1	D2	D1	D2	
Perikanan	50	0 Orang	1	0 Orang	50	0 Orang	Mentor 5 Orang
	27 Orang	0 Orang	0	0 Orang	27	0 Orang	Mentor 3 Orang
	0	40 Orang	0	0 Orang	0	40 Orang	0 Mentor
	0	4 Orang	0	0 Orang	0	4 Orang	0 Mentor
	0	22 Orang	0	0 Orang	0	22 Orang	0 Mentor
Jumlah	Jumlah 77 Orang	Jumlah 22 Orang	Jumlah 11 Orang	Jumlah 22 Orang	Jumlah 64 Orang	Jumlah 40 Orang	

Dari tabel di atas dapat diketahui mayoritas SDM di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah lulusan Sarjana (S1) dan yang berada pada golongan III. Secara kuantitas SDM masih sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat yang meluas di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

3.3.2. Sarana / Prasarana Pemanjang

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang sangat berpengaruh dalam berhasil tidaknya suatu program sehingga menjadi prasyarat untuk terlaksananya program CPD dalam melaksanakan kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan suatu instansi membutuhkan kepastian seperti pemeliharaan beberapa fasilitas berteknologi komputerisasi, terdapatnya sumber dana yang memadai, kebijakan dan kegiatan dalam rangka SDM yang terampil, inovatif, produktif dan profesional.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan dirinci pada tabel sebagai berikut:



Tabel 1.3. Daftar Saluran dan Fasilitas Utama Kabupaten Parigi dan Pertanian Kota Madan (Peran Maret 2022)

No	Saluran	Jumlah	Kapasitas/ Waktu
	Saluran		
1	Parigi	1	
	PERALATAN	1.000	
2	Traktor Motor	41	
3	Alat-alat Agrikultur	41	
4	Alat-alat Komputer	100	
5	Alat-alat Pertanian	110	
6	Alat Harau dan BT	100	
7	Alat Bajak dan lain	10	
8	Alat Memanen	41	
9	Alat Pengangkutan	1.000	
10	Alat Memanen	1	
	SAKSI	20	
11	Kapasitas Salang	12	
12	Kapasitas Memanen	1	
	ALAM DAN LINGKUNGAN	10	
13	Luas lahan pertanian	17	
14	Kapasitas dan lahan	10	
15	Perikanan	1	
16	Jumlah	1	
	ASPEK TETAP LAINNYA	1.470	
17	Luas dan Pengangkutan	1.470	
18	Kapasitas Memanen	1	
19	Kapasitas dan Memanen	1	
	KDP	0	
20	Kapasitas Salang	1	

Kondisi Saluran Perikanan perikanan di Dinas Kabupaten Parigi dan Pertanian Kota Madan meskipun dalam kondisi baik, namun apabila dibandingkan dengan lokasi yang melihat serta jumlah perikanan di Dinas Kabupaten Parigi dan Pertanian Kota Madan masih terdapat beberapa kekurangan sarana perikanan utamanya komputer dan laptop serta lahan air.

3.3. Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan diuraikan Tujuan pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pangan dan Peltaran Kota Medan berisikan untuk mencapai tujuan (sebelum perubahan) :

1. Membentuyakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian

Untuk tujuan sebelum perubahan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mandiri

Adapun pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Pangan dan Peltaran Medan dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 :



Tabel 2. 4. Resonansi Energi Polimeran Ciri Kelangkaan Pangan dan Perumahan Kota Medan

No	Kategori	Kode	Nama	Kategori Kelangkaan Pangan					Kategori Perumahan					Kategori Lainnya				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kategori Pangan	P1	Beras	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kategori Perumahan	P2	Rumah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Kategori Lainnya	P3	Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Kategori Pangan	P4	Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
8				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Kategori Perumahan	P5	Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Kategori Lainnya	P6	Lainnya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Date	Time	Activity	Monday				Tuesday				Wednesday				Thursday			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
09/01/2023	08:00	Start of shift																
09/01/2023	08:30	Handover																
09/01/2023	09:00	Ward rounds																
09/01/2023	09:30	Medication																
09/01/2023	10:00	Documentation																
09/01/2023	10:30	Ward rounds																
09/01/2023	11:00	Medication																
09/01/2023	11:30	Documentation																
09/01/2023	12:00	Handover																
09/01/2023	12:30	Lunch																
09/01/2023	13:00	Ward rounds																
09/01/2023	13:30	Medication																
09/01/2023	14:00	Documentation																
09/01/2023	14:30	Ward rounds																
09/01/2023	15:00	Medication																
09/01/2023	15:30	Documentation																
09/01/2023	16:00	Handover																
09/01/2023	16:30	Ward rounds																
09/01/2023	17:00	Medication																
09/01/2023	17:30	Documentation																
09/01/2023	18:00	Handover																
09/01/2023	18:30	End of shift																

09/01/2023



Table 2. 6. Penyebaran Biaya Program: Tiga Kategori Pengeluaran dan Perkiraan Biaya Mula-mula Setelah Perbaikan Saluran

No. Urut	Kategori Biaya Program (Kategori, Sub-kategori, dan Sub-sub-kategori)				Tipe Biaya Program Saluran					Saluran Transmisi/Telegi					Kontingensi				
	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	000				000					000									
2	000				000					000									
3	000				000					000									
4	000				000					000									

Jahr	Wirtschaftliche Lage (Ergebnis, Bilanzposition, etc. Angabe des Jahres)				Erlösstruktur (Ergebnis)					Ergebnisstruktur (Ergebnis)					Ergebnisstruktur					
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
2010
2011
2012
2013
2014

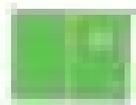
Year	Initiative/Program/Project (Country, Region/World, or Global)				Total Budget (Proposed/Actual)					Initiative/Program/Project					Total Budget						
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
2010-2014																					

No	Name of the Party (Name of the Party to be mentioned)				Type of Party (Type of Party)					Political Party (Type)					Other Parties				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																			
2																			
3																			
4																			



...

Date	Name of the Project (Name, Location, etc.)				Total Hours (Project Code)					Number of Days (Type)					Cost (Type)				
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															
11-11-2011		1000	1000	1000															



Project Name: [Redacted]

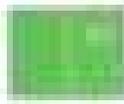
Location: [Redacted]

Date: [Redacted]

Year	Federal State Program/Contract, Agreement, or Financial Order				Fiscal Month / Budget Code					Fiscal Year/ Fiscal					Fiscal Order				
	00	01	02	Activity Account	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04
2011	0000				00	01	02	03	04	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04
2012	0000				00	01	02	03	04	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04
2013	0000	0000	0000		00	01	02	03	04	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04
2014	0000	0000	0000		00	01	02	03	04	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04
2015	0000	0000	0000		00	01	02	03	04	00	01	02	03	04	00	01	02	03	04



No	Name of the project / activity / programme / scheme				Project/Activity/Programme/ Scheme					Budget/Expenditure					Actual/Spent				
	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl	Sl
1		1	1	1															
2		2	2	2															
3		3	3	3															
4		4	4	4															



No	Name of the Project / Activity / Program / Scheme / etc.				Type of the Project / Activity / Program / Scheme / etc.					Duration of the Project / Activity / Program / Scheme / etc.					Status					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				



Year	Initial State (Year 0) - Investment, 1000 (€)				Cash Flows (€)					Discount Factor					NPV					
	0	1	2	3	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	
1																				
2		100	100			100	100	100	100											
3		100	100	100		100	100	100	100											
4		100	100	100	100															



Year 2018	Business Group (Business), Department, or Project (or other)				Total Number of Employees					Total Number of Hours					Total Payroll					
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
2018																				
2019																				
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				



Year	National Health Program (NHP) - National Health, and Mental Health				NHP - National Health, and Mental Health					NHP - National Health, and Mental Health					NHP - National Health, and Mental Health					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2011																				
2012																				
2013																				
2014																				
2015																				
2016																				
2017																				
2018																				
2019																				
2020																				
2021																				
2022																				
2023																				
2024																				
2025																				
2026																				
2027																				
2028																				
2029																				
2030																				



Year	Number of students enrolled in each grade level				Total Number Enrolled					Number of Students					Total Enrolled					
	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th
2010																				
2011																				
2012																				
2013																				



Proj	Detailed Project Description (Project Title, ID, etc.)				Project Budget/Financial Data					Detailed Budget Breakdown					Other Details					
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				



No	Kategori: (nama program, semester, tahun, dan disiplin ilmu)				Tipe: (jenis program studi)					Mata Kuliah (nama)					Kode					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				



No	Detailed Description of Program/Project, Location, and Other Information				Project Activity/Workload Status					Financial Summary/Target					Date/Status					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Project A	Project A	Project A																
2		Project B	Project B	Project B																
3		Project C	Project C	Project C																
4		Project D	Project D	Project D																



Year	Initial State Program (Federal, State, Local, and Other) (See Note)				Total State Program (Total)					Mathematics Page					Other Pages					
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
2011		1000000	1000000			1000000	1000000	1000000	1000000											
2012		1000000	1000000	1000000		1000000	1000000	1000000	1000000											
2013		1000000	1000000	1000000		1000000	1000000	1000000	1000000											
2014		1000000	1000000	1000000		1000000	1000000	1000000	1000000											
2015		1000000	1000000	1000000		1000000	1000000	1000000	1000000											

Fiscal Year	Initiative Name/Project (Priority, Budget, Status, etc. - replace with text)				Target Number/Percentage/Value					Initiative/Output Target					Other Metrics					
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
2023-2024		1000000	1500000	2000000		100	100	100	100											
2024-2025			1000000	1500000		100	100	100	100											
2025-2026			1000000	1500000		100	100	100	100											
2026-2027			1000000	1500000		100	100	100	100											



Fiscal Year	Initiative (Strategic Program, Department, Division, Office, and Agency) (Full Name)				Fiscal Measure (Programmatic Measure)					Fiscal Measure (Target)					Notes/Comments						
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		



Fiscal Year	Initiated (New) Program (Priority, Budget, and Status) (All Years)				Fiscal Year Program Status					Fiscal Year Budget					Fiscal Year Status					
	2011	2012	2013	Program Status	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
2011	Initiated																			
2012	Initiated																			
2013	Initiated																			
2014	Initiated																			
2015	Initiated																			



Date	Project Name (Activity Name) (Month, Year)				Project Status (Progress %)					Project Budget (Cost)					Project Impact (Benefit)					
	Start	End	Duration	Phase	Planned	Actual	Variance	Remaining	Total	Spent	Variance	Remaining	Total	Spent	Variance	Remaining	Total	Spent	Variance	Remaining
10/01/2023	10/01/2023	10/31/2023	31 Days	Phase 1	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
10/02/2023	10/02/2023	10/31/2023	30 Days	Phase 2	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
10/03/2023	10/03/2023	10/31/2023	30 Days	Phase 3	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
10/04/2023	10/04/2023	10/31/2023	30 Days	Phase 4	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%
10/05/2023	10/05/2023	10/31/2023	30 Days	Phase 5	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%



No	Detailed description of the activity to be performed				Proposed budget (USD)					Actual budget (USD)					Total budget					
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1			100000	200000			100	200	100											
2		100000	200000	300000		100	200	300												
3			100000	200000			100	200	100											
4			100000	200000			100	200	100											

Year 2018	National Health Program (NHP) - National Health Survey (NHS)				NHP - National Health Survey (NHS)					NHP - National Health Survey (NHS)					NHP - National Health Survey (NHS)					
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				



Project ID	Project Name (Country), Region (Continent), and Status (On Hold)				Project Dates (Project Start)					Project Budget (Budget)					Project Status					
	Year	Month	Day	Time	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				

No	Name of the Project (Project Name, Location, etc.)				Project Status/Progress					Financial Details					Other Details					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Project Name	Location	Project Type																
2		Project Name	Location	Project Type																
3		Project Name	Location	Project Type																

Tabel 2.5. Rapport der Realized Performance Performance über verschiedene Szenarien der Realized Risk Metrics

No	Kategori	Performance Return					Value at Risk (VaR)					Value at Risk (VaR) - Expected Return					Overall Performance	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5		
1	Performance Return	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	Performance Return	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3	Performance Return	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4	Performance Return	0	0.000000	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0.000000	0.000000
5	Performance Return	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
6	Performance Return	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
7	Performance Return	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0.000000
8	Performance Return	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0.000000
9	Performance Return	0	0	0.000000	0.000000	0.000000	0	0	0.000000	0.000000	0.000000	0	0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
10	Performance Return	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000
11	Performance Return	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000
12	Performance Return	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000	0	0	0	0.000000	0.000000



No.	Kategori	Program 1000 Hari					Kegiatan Kegiatan Lain					Kegiatan Kegiatan Lain					Total	
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jan	Feb
1	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Program 1000 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan: * Realisasi (data perputar hingga Desember 2020)



FACILITY NAME	Type Program					National Program					Non-Title Program or Service				
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															



Financial Institution	Open Deposits					Revolving Deposits					Time-based Deposits (not included)				
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jan	Feb	Mar	Apr	May
Bank of America															
Bank of America		10,000	10,000		10,000										
Bank of America				10,000	10,000										
Bank of America				10,000	10,000										
Bank of America		10,000	10,000	10,000	10,000										
Bank of America		10,000	10,000	10,000	10,000										
Bank of America		10,000	10,000	10,000	10,000										
Bank of America		10,000	10,000	10,000	10,000										



Project and Location	Type Program					Budget Program					Non-Other Budget and Budget				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000								
	100,000,000					100,000,000									
	100,000,000					100,000,000									
		100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000										
		100,000,000													



Program Name (English)	Fiscal Budget					Medical Budget					Radioactive Budget (for Equinox)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Program 1																
Program 2																
Program 3																
Program 4																
Program 5																
Program 6																
Program 7																
Program 8																
Program 9																
Program 10																
Program 11																
Program 12																
Program 13																
Program 14																
Program 15																
Program 16																
Program 17																
Program 18																
Program 19																
Program 20																
Program 21																
Program 22																
Program 23																
Program 24																
Program 25																
Program 26																
Program 27																
Program 28																
Program 29																
Program 30																
Program 31																
Program 32																
Program 33																
Program 34																
Program 35																
Program 36																
Program 37																
Program 38																
Program 39																
Program 40																
Program 41																
Program 42																
Program 43																
Program 44																
Program 45																
Program 46																
Program 47																
Program 48																
Program 49																
Program 50																
Program 51																
Program 52																
Program 53																
Program 54																
Program 55																
Program 56																
Program 57																
Program 58																
Program 59																
Program 60																
Program 61																
Program 62																
Program 63																
Program 64																
Program 65																
Program 66																
Program 67																
Program 68																
Program 69																
Program 70																
Program 71																
Program 72																
Program 73																
Program 74																
Program 75																
Program 76																
Program 77																
Program 78																
Program 79																
Program 80																
Program 81																
Program 82																
Program 83																
Program 84																
Program 85																
Program 86																
Program 87																
Program 88																
Program 89																
Program 90																
Program 91																
Program 92																
Program 93																
Program 94																
Program 95																
Program 96																
Program 97																
Program 98																
Program 99																
Program 100																



Kategori Kegiatan	Pusat Kegiatan					Kantor Kegiatan					Kantor Kegiatan (Kantor Lain)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1. Kegiatan Kelembagaan			100,00%	100,00%	100,00%										
2. Kegiatan Operasional			100,00%	100,00%	100,00%										
3. Kegiatan Pengembangan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										
4. Kegiatan Lainnya		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%										



Business Unit	High Impact					Medium Impact					Low or No Impact on Budget				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Business Unit 1															
Business Unit 2			10,000,000	10,000,000	10,000,000										
Business Unit 3			10,000,000	10,000,000	10,000,000										
Business Unit 4	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Business Unit 5	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Business Unit 6	10,000,000					10,000,000									
Business Unit 7	10,000,000					10,000,000									
Business Unit 8	10,000,000					10,000,000									
Business Unit 9	10,000,000					10,000,000									

Kategori Kendaraan	Pajak Penghasilan					Kendaraan Bermotor					Kendaraan Bermotor dan Kendaraan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	1000000					1000000									
2	1000000					1000000									
3	1000000					1000000									
4	1000000					1000000									
5	1000000					1000000									
6	1000000					1000000									
7	1000000					1000000									
8	1000000					1000000									
9	1000000					1000000									
10	1000000					1000000									
11	1000000					1000000									
12	1000000					1000000									
13	1000000					1000000									
14	1000000					1000000									
15	1000000					1000000									
16	1000000					1000000									
17	1000000					1000000									
18	1000000					1000000									
19	1000000					1000000									
20	1000000					1000000									
21	1000000					1000000									
22	1000000					1000000									
23	1000000					1000000									
24	1000000					1000000									
25	1000000					1000000									
26	1000000					1000000									
27	1000000					1000000									
28	1000000					1000000									
29	1000000					1000000									
30	1000000					1000000									
31	1000000					1000000									
32	1000000					1000000									
33	1000000					1000000									
34	1000000					1000000									
35	1000000					1000000									
36	1000000					1000000									
37	1000000					1000000									
38	1000000					1000000									
39	1000000					1000000									
40	1000000					1000000									
41	1000000					1000000									
42	1000000					1000000									
43	1000000					1000000									
44	1000000					1000000									
45	1000000					1000000									
46	1000000					1000000									
47	1000000					1000000									
48	1000000					1000000									
49	1000000					1000000									
50	1000000					1000000									



PRIORITY ACTION	2016 Budget					2017 Budget					2018-2022 Budget (Estimated)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
...															
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
...		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										



Kategori dan Sub-kategori	Tipe Kegiatan					Metode Kegiatan					Sifat atau Aspek dari Kegiatan				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			100%	100%	100%										
					100%										
			100%	100%	100%										
				100%	100%										
				100%	100%										
		100%	100%	100%	100%										
		100%	100%	100%	100%										
		100%	100%	100%	100%										



Week	Days					Months					Years				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															



Fiscal Year	2014 Budget					2015 Budget					2016 Budget				
	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020
2014	100,000					100,000									
2015	100,000					100,000									
2016	100,000					100,000									
2017	100,000					100,000									
2018	100,000					100,000									
2019	100,000					100,000									
2020	100,000					100,000									
2021		100,000	100,000	100,000	100,000										



Kategori Item	Kategori 1					Kategori 2					Kategori 3				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Item 1															
Item 2															
Item 3															
Item 4															
Item 5															
Item 6															
Item 7															
Item 8															
Item 9															
Item 10															
Item 11															
Item 12															
Item 13															
Item 14															
Item 15															
Item 16															
Item 17															
Item 18															
Item 19															
Item 20															



Project name	Phase 1 Progress					Phase 2 Progress					Phase 3 Progress (Total)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
Project A		100%	100%	100%	100%										
Project B		100%	100%	100%	100%										
Project C		100%	100%	100%	100%										
Project D		100%	100%	100%	100%										
Project E		100%	100%	100%	100%										
Project F		100%	100%	100%	100%										
Project G		100%	100%	100%	100%										
Project H		100%	100%	100%	100%										
Project I		100%	100%	100%	100%										
Project J		100%	100%	100%	100%										



Programme and Activity	First Session					Second Session					Third and/or Fourth and Further				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										
	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000										



Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan perbandingan capaian dengan Triwulan III September Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Indikator stabilitas energi atas ketahanan pangan dan pertanian kota melalui benih baik
Disebandingkan dengan target RPMD dengan capaian 2019 sebesar 100,00%.
2. Indikator produktifitas hasil pertanian
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 100,00%.
3. Indikator prosentase ketenagakerjaan bahan pangan utama
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 104,00%
4. Indikator Proses pengolahan (loging)
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 70,00%.
5. Indikator produksi perikanan
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 70%.
6. Indikator prosentase ternak terbeli
Disebandingkan dengan target RPMD maka capaian di tahun 2019 ini sebesar 100%.

Dari indikator-indikator tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Tahun 2019 disbandingkan target RPMD sebagian belum tercapai 100% hal ini disebabkan capaian masih pada triwulan III Bulan September 2019.



Pada Tahun 2020 dapat disimpulkan perbandingan sebagai berikut dengan Triwulan Di September Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Indikator stabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh nilai 85,2
2. Indikator Indeks ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 50,54
3. Indikator Peningkatan Produktivitas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 6,30 ton/ha
4. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Peternakan dengan Rasio Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 1,41%
5. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Pertanian dengan Rasio Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 2,25%
6. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Perikanan dengan Rasio Produksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 2,25%
7. Indikator Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 95,9 nilai
8. Indikator Peningkatan Produktivitas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 6,30 ton/ha
9. Indikator Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 1,43%
10. Indikator Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota madura diperoleh 1,42%



Pada Tahun 2021 dapat dicapai perbandingan target dengan Triwulan IV Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Indikator Indeks ketahanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 80,88
2. Indikator multifungsi kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh baik 80,00
3. Indikator Peningkatan Produktivitas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 7,02 ton/ha
4. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Peternakan dengan Rasio Produk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 1,41%
5. Indikator Rasio Pendapatan Petaku Usaha Pertanian dengan Rasio Produk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 1,43%
6. Indikator Skor Pola Pangan Harapan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota medium diperoleh 95,8 mbaku

Pada sasaran untuk mencapai target P RP/PC didukung oleh beberapa urusan pada BEHETSA Perubahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 8. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RP/PP

NO	Sasaran	PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
URUSAN PANGAN			
1	Memperluas Akses Pangan dan Diversifikasi Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8070
		Kepolisian Perikanan Perikanan: Perikanan	
		Kepolisian Perikanan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	
		Kepolisian Perilaku Pola Konsumsi Pangan, Safety Drinking, Safety dan Active	
		Kepolisian Perikanan dan Perikanan: Perikanan Pangan	
		Kepolisian Perikanan Pangan dan Perikanan Pangan	



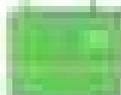
NO	Sasaran	PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
		Rencana Pengujian Cakupan Fangan dan Desain Keterseruan Fangan	
		Program Pemeliharaan Efektivitas dan Keefektifan Fangan Moneviasi	2021-2024
		Rencana Perbaikan dan Penyusunan Fangan Nihil atau Fangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan Keterseruan/Ke-efektifan/Keefektifan Produk dan Harga Fangan	
		Sub-kegiatan Penyusunan Informasi Harga Fangan dan Harga dalam Moneviasi	
		Sub-kegiatan Penyusunan Fangan Berbasis Sistem Jarak Jauh	
		Sub-kegiatan Pemantauan Hrg, Produk dan Harga Fangan	
		Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Target Nasional Fangan, Perbaikan Tahun untuk target jangka menengah dan	
		Sub-kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Nasional Fangan per Regia per Tahun	
		Sub-kegiatan Pemantauan Pemantauan Jaban Pengembangannya Nasional Fangan Berbasis Sistem Jarak Jauh	
		Sub-kegiatan Pemantauan dan Berencana Pemantauan dan Evaluasi Nasional per Regia per Tahun	
		Program Pemantauan Moneviasi Fangan	2021-2024
		Rencana Penyusunan Pola pemantauan dan moneviasi dengan Moneviasi	
		Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Pola Moneviasi dan Keterseruan Fangan	
		Program Pemantauan Moneviasi Fangan	2021-2024
		Rencana Pelaksanaan Pemantauan Moneviasi Fangan Jajar Jarak Moneviasi Fangan	
		Sub-kegiatan Penyusunan Moneviasi Fangan Jajar Jarak Keterseruan Kita	
		Sub-kegiatan Perbaikan Sistem dan Prosesnya Fangan Moneviasi Moneviasi Fangan Jajar Anal Tindakan Dengan Keterseruan Kita	



NO	Nama	PROGRAM DAN KEGIATAN	KEPERLUAN
LOKUSAN PERALIHAN			
01	Meningkatkan Kompetensi Petaka Masalah Perikanan	Program Peningkatan Kompetensi Petaka Usaha Perikanan	2020
		Kegiatan Pendampingan, Pemantauan dan Penguatan Kapasitas Petaka	
		Kegiatan Kegiatan Mata Peningkatan dan Transfer Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Perikanan Budidaya	2023-2024
		Kegiatan Pendampingan Petaka Desa dan Desa	
		Sub Kegiatan Pemetaan Pendampingan, Identifikasi Masalah Sifat Peningkatan, Transfer dan Informasi, serta Penyempurnaan Petaka dan Petaka	
		Kegiatan Kegiatan Peningkatan Budidaya dan Sub Kegiatan Pemetaan Pemetaan Peningkatan dan Desa 1 (Desa) dan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Kegiatan Peningkatan Budidaya dan Pemetaan Peningkatan dan Desa 1 (Desa) dan Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Pemetaan dan Pemetaan Peningkatan dan Desa	
		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perikanan	2021-2024
		Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Cangkang Air Laut yang Dapat Dinafikan dalam Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Cangkang Air Laut yang Dapat Dinafikan dalam Kabupaten/Kota	
		Program Peningkatan dan Pemetaan Hasil Perikanan	2021-2024
		Kegiatan Pemetaan Mata dan Kegiatan Hasil Perikanan dan Usaha Peningkatan dan Pemetaan (Desa Mata dan Desa)	
		Sub Kegiatan Pemetaan dan Kegiatan dan Pemetaan Pemetaan Mata Kegiatan Mata Usaha Peningkatan dan Pemetaan (Desa Mata dan Desa)	



NO	Rencana	PROGRAM DAN KEGIATAN	KETERANGAN
		Kegiatan Penyediaan dan Penyebaran Pakan Baru, Inokulasi Pengolahan Kain Dalam (Jasa) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Penyebaran Pakan Baru Pakan (Jasa) Penyebaran (Jasa) Pakan dan Kain Dalam (Jasa) Daerah Kabupaten/Kota	
LEMAH PONTIANAK			
121	Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	Program Pengabdian Masyarakat Pakan	2020
		Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pakan	
		Kegiatan Pengabdian Pakan dan Penyebaran Pakan	
		Kegiatan Dukungan Penyebaran Pakan	
		Kegiatan Penyebaran, Pembinaan, Sosialisasi, Pengabdian dan Pelatihan	
		Kegiatan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Pakan	
		Program Pengabdian Masyarakat Pakan (jasa) Kabupaten	2021-2024
		Kegiatan Pengabdian Masyarakat Teknologi Pakan dan Ternak	
		Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penyebaran Produk Hasil Penelitian	
		Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Pengabdian Masyarakat (jasa) Ternak dan Pakan	
		Kegiatan Kesehatan Masyarakat Ternak	
		Program Pengabdian dan Pengembangan Sumber Pakan	2021-2024
		Kegiatan Pengembangan Produksi Ternak Pakan	
		Sub Kegiatan Pengembangan Produksi Ternak Pakan dan Pengembangan Ternak Dengan Kesehatan, Teknologi dan Kualitas Ternak	
		Sub Kegiatan Pengembangan Produksi Ternak Pakan	
		Kegiatan Pengabdian Pakan dan Penyebaran Pakan (jasa) Ternak dan Ternak Pakan Ternak dan Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Pengembangan Pakan Ternak, Pakan Pakan/Pakan Ternak (jasa) Ternak	



No	Sasaran	PROGRAM DAN KEGIATAN	BETAWA/TAHUN
	Meningkatkan Kemampuan Pemula Mula Penemuan	Program Pengembangan Kualitas Manusia dan Kemampuan Masyarakat Rantau Kegiatan Pengajaran Kurikulum Hewan Persebaran dan Penemuan Daerah Studi Terpadu Hewan Persebaran dan Daerah Kelengkapan Kota dan Kegiatan Pengembangan dan pengembangan Pengabdian Hewan dan Manusia Kegiatan Pengajaran Pengajaran dan Laboratorium dan Jasa Pemula Hewan dan Jasa Kelengkapan Kota dan Kegiatan Penelitian Penelitian dan Jasa Hewan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Terpadu Penelitian Masyarakat Hewan dan Kegiatan Pengembangan dan Jasa Hewan dan Jasa Hewan dan Kegiatan Pengembangan penelitian Hewan dan Jasa Hewan	2020-2024
RATU			
IV	Meningkatnya Nilai Sistem Administrasi Sistem Pemerintahan (SASIP) Perangkat Daerah	Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Kegiatan Penelitian, Jasa, Penelitian dan Pengembangan Kota Kegiatan Penelitian dan Penelitian Hewan Daerah Program Peningkatan Rantai Nilai Kota Kegiatan Penelitian, Penelitian, Jasa dan Jasa Kegiatan Penelitian, Penelitian, Jasa dan Jasa Kegiatan Penelitian, Penelitian, Jasa dan Jasa Program Pengembangan Sistem Administrasi Sistem Hewan dan Manusia Kegiatan Penelitian, Jasa dan Jasa Hewan dan Jasa Hewan Hewan Hewan	2020 2020 2020
	Meningkatnya Nilai Sistem Administrasi Sistem Pemerintahan (SASIP) Perangkat Daerah	Program Peningkatan Sistem Administrasi Sistem Pemerintahan Kota	2020-2024



NO	Kategori	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELEMBARAN
		Kegiatan Intelektual, Pengabdian Masyarakat dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pemasaran) Kegiatan Lain-lain	
		Kali Kegiatan Intelektual dan Pengabdian Masyarakat Kegiatan Lain-lain dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain	
		Kegiatan Intelektual dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kegiatan Intelektual dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain	
		Kali Kegiatan Intelektual dan Pengabdian Masyarakat Kegiatan Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kali Kegiatan Intelektual dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kegiatan Intelektual dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain Kegiatan Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kegiatan Intelektual dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain Kegiatan Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kegiatan Intelektual dan Forum Karya Ilmiah Lain-lain Kegiatan Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	
		Kali Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Lain-lain	



3.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Kebijakan Opd

3.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Pada Perda tentang RT/RW, Lahan pertanian yang ada di lingkungan hanya hanya sekitar 443 ha.
2. Semakin berkurangnya petani pemilik punggawa lahan.
3. Semakin sulitnya tenaga kerja di sektor pertanian.
4. Produksi pertanian kurang mengoptimalkan di pasaran pada saat panen raya harga jatuh.
5. Saat produksi pertanian membutuhkan tempat jual dan modal untuk konsumsi produk hortikultura.
6. Masih kurangnya kemampuan petani dalam mengembangkan usaha taninya.
7. Belum adanya kebijakan hukum tentang pembinaan usaha pertanian. Kombinasi yang dilaksanakan antara petugas dan petani belum optimal.
8. Tersedianya dana yang terbatas.
9. Sebagian besar usaha ternak pertanian masih bersifat usaha sampingan.
10. Kolompok ternak sebagai lembaga sosial belum berfungsi secara optimal.
11. Pemilikan kolam masih sempit,vecd dan terpecah-pecah.
12. Sistem pengairan dari masyarakat kurang kasus penyakit hewan masih kurang efektif.
13. Minimnya pengetahuan pemerintah tentang diagnosis ayeri pada kejadian penyakit flu burung.
14. Petalping masih mengutamakan keuntungan daripada kesehatan konsumen.
15. Terbatasnya tenaga penyuluh kesehatan pangan.
16. Belum tersedianya data tentang sistem distribusi pangan.
17. Belum tergapainya pola konsumsi masyarakat.



2.4.2 Peluang

Adapun peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan konsumsi pangan secara SDSA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) di semua kecamatan
2. Peningkatan peran masyarakat dalam FSL tingkat RW
3. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan pangan non beras non trigo
4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan menu pangan untuk (sakit, stunting, ibu hamil dan lansia)
5. Peningkatan SDM masyarakat terkait skor pola Pangan Bergizi
6. Peningkatan pembinaan struktur SDM kelompok tani
7. Peningkatan peran masyarakat dalam inovasi pertanian urban terintegrasi yang ramah lingkungan
8. Peningkatan budaya lahan madu
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengolahan produk hasil pertanian dan peternakan
10. Peningkatan peran masyarakat dalam ketahanan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
11. Fasilitas pemanfaatan Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian untuk kelompok tani
12. Fasilitas pemberian subsidi pupuk bagi kelompok tani
13. Peningkatan peran masyarakat melalui sosialisasi penanganan limbah pertanian dan peternakan
14. Pembinaan kontribusi untuk pengendalian angka stunting kota melalui dari bahan makan pokoknya
15. Fasilitas pendayaan premi Asuransi Usaha Tani
16. Mekanisme pengaturan penyakit hewan menular (rebas)
17. Peningkatan SDM masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundangan terkait pertanian, peternakan dan kesehatan hewan
18. Peningkatan pembinaan kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan
19. Peningkatan peran masyarakat dalam konsumsi ikan
20. Peningkatan peran masyarakat dalam produksi ternak ikan



21. Perangkat SOP menyatakan dalam pengalihan dan pemisahan hasil pekerjaan
22. Perangkat SOP menyatakan metode pemilihan peralatan pendukung terkait pekerjaan
23. Perangkat peran menyatakan dalam pengalihan sumber daya pekerjaan aktual





BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tujuan dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Issu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diantisipasi dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, mendesak, bersifat kolektif/komprehensif dan melibatkan banyak di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari isu eksternal maupun internal. Isu eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, DPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan isu internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi. Isu sendiri yang diperhatikan atau menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Diras Kabupaten Pangan dan Pertanian merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Mendukung menuju strategi terpadu dengan tugas dan fungsi Dinas Kabupaten Pangan dan Pertanian Kota Padang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi (PF) Dinas Kabupaten Pangan dan Pertanian

No	Isu strategis sebelum perubahan	Isu strategis setelah perubahan
1.	Konsumsi dan insentif vertikal (grupnya, komersial, ? lembaga) seringkali berubah	Peningkatan konsumsi pangan secara R2TA (Beragam, Beragam, Seimbang dan Aman) belum optimal
2.	Pelebaran kapula masyarakat masih kurang optimal jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan Perekonomian, Pertanian, Perikanan dan Kabupaten Pangan.	Inovasi sistem pertanian termasuk peningkatan dan Kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, UTJA, Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan Pemeliharaan) belum optimal
3.	Masyarakat kota Padang berorientasi pada sektor perdagangan dan jasa sehingga sektor Pertanian, Perekonomian dan Perikanan serta Kabupaten Pangan hanya benefit samping jika saja sampingan	Inovasi sistem pertanian (teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran) belum optimal
4.	Kurangnya tenaga kerja, dan kurang tekniknya tenaga dan terapan RPH berimbas pada penurunan jumlah tanah yang produktif	

Perubahan isu strategis terpadu urusan Dinas Kabupaten Pangan dan Pertanian pada tabel di atas menjelaskan masyarakat kota Padang perlu diberikan ekstra edukasi dan stimulasi untuk berinovasi lebih lagi terkait sistem pertanian dan perikanan sehingga dapat memperoleh konsumsi pangan secara Beragam, Beragam, Seimbang dan Aman (R2TA)

dan tujuan Dinas untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan cepat terwujud.

Ada strategi tersebut muncul karena permasalahan sebagai berikut:

- a. semakin sempitnya lahan pertanian dan perikanan,
- b. kurangnya minat masyarakat untuk menggali informasi secara mandiri terkait informasi ilmu pengetahuan terkait teknologi pertanian/perikanan perkotaan
- c. biaya konsumsi masyarakat yang lebih tinggi daripada memproduksi secara mandiri
- d. lahan yang tidak dapat diproses
- e. kemampuan SDM petani yang belum berorientasi bisnis
- f. penyakit ternak yang kian meningkat

3.2. Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota Padang sebagaimana dijabarkan dalam RPMD Kota Padang tahun 2018 – 2021, memiliki Visi “Terwujudnya Pemerintahan Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan Masyarakat, Berkeadilan” visi ini menjadi landasan seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Padang, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Padang dalam 3 (tiga) tahun kedepan. Sebagai salah satu mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 misi yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (GOOD GOVERNANCE)
2. Mewujudkan Pembangunan yang berkeadilan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat kota Padang
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat kota Padang

Berdasarkan visi misi P-RPMD di atas, maka tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Padang adalah berupaya mendukung untuk mewujudkan visi kota Padang yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan memeratakan tingkat kesejahteraan



masarakat Kota Medan dengan turut berperan mengurangi angka kemiskinan.

Upaya perwujudan visi misi P-RPMD tersebut adalah dengan berupaya meningkatkan kualitas kompetensi para pelaku pertanian, perikanan, perikanan, maupun menjaga stabilitas ketahanan pangan dan pemertanian ketahanan masyarakat dengan memfokuskan berupa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya visi misi yang hendak dicapai.

Selengkapnya dapat diuraikan dalam tabel bahwa visi, misi, program P-RPMD 2018 - 2024 merupakan target capaian yang menjadi komitmen dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Medan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPMD maka Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Medan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang terkandung dalam menunjang keberhasilan pencapaian target tujuan program prioritas utama. Dalam persiapan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam urusan pelaksanaan pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, sebagaimana diuraikan dalam bentuk ini :

Tabel 3. 3. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan DPD terhadap program visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Medan				
No	Misi dan Program prioritas Daerah dan Wakil Walikota Medan	Pembahasan program lain	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia tingkat Kecamatan Kabupaten Kabupaten Kota Medan	Meningkatkan kemampuan sumber daya SDIA (Sungai, Bengawan, Selumbang dan Amas) dalam upaya	Padat Penduduk (terutama AT/DA), Lokasi pertanian yang sulit dibudidayakan karena terdapat 442 ha.	Meningkatkan kemampuan sumber daya SDIA (Sungai, Bengawan, Selumbang dan Amas) di semua kecamatan
2.		Kelembagaan petani pertanian melalui pembentukan dan pembinaan lembaga (Koperasi produksi, pengalihan, UPJ/Unit Pelaksana Jasa Rata Rata Pertanian dan Pemasaran) dalam upaya	Kelembagaan terkurangnya petani petani penggarap lahan, Sertifikat lainnya banyak terdapat di sektor pertanian, Perilaku pertanian kurang mampu bersaing di pasaran pada saat panen raya khususnya	Meningkatkan peran masyarakat dalam P2L tingkat RW, Meningkatkan peran masyarakat dalam pengalihan pangan dari rumah ke pasar



tbl. 1. Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Masyarakat Secara Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Taruhan	
			Keberhasilan	Keberhasilan
1.		Adanya sistem pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	Tidak pernah memberikan layanan kepada masyarakat	Menyediakan jasa pelayanan dengan prosedur yang jelas, standar, dan terukur
2.			Tidak melayani masyarakat dengan baik	Menyediakan jasa pelayanan yang baik dan cepat
3.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur
4.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur
5.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur
6.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur
7.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur
8.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur
9.			Adanya keluhan masyarakat yang belum terjawab	Menyediakan prosedur pelayanan yang jelas, standar, dan terukur



2011 Technology Competencies Based on National Standard Competency				
No	Materi Program Kejuruan Dasar dan Materi Kejuruan Spesifik Kejuruan	Kemampuan umum (SK)	PADA	
			Pengetahuan	Keterampilan
				Materi Kejuruan untuk Kejuruan lain
10.			Materi kejuruan yang terdapat dalam kejuruan yang lain	Pengetahuan mengenai kejuruan yang lain, seperti: nama, fungsi, dan kejuruan yang lain yang ada dalam kejuruan lain
11.			Materi kejuruan yang terdapat dalam kejuruan lain	Pengetahuan mengenai kejuruan lain, seperti: nama, fungsi, dan kejuruan yang lain yang ada dalam kejuruan lain
12.				Pengetahuan mengenai kejuruan lain, seperti: nama, fungsi, dan kejuruan yang lain yang ada dalam kejuruan lain
13.				Pengetahuan mengenai kejuruan lain, seperti: nama, fungsi, dan kejuruan yang lain yang ada dalam kejuruan lain
14.				Pengetahuan mengenai kejuruan lain, seperti: nama, fungsi, dan kejuruan yang lain yang ada dalam kejuruan lain



Tabel 1.1.1. Terwujudnya Pemertanian Berakit berakhlak sebagai Masyarakat Sejahtera				
No	Nama dan Program Kerja/ Bidang dan Unit Kerja/ Ruang Lingkup	Kategori/ Subkategori/ Indikator	Tipe	
			Struktural	Prosedural
				partisipatif
11.				Perencanaan yang terpadu/ terintegrasi dalam pengalokasian sumber daya pemerintah untuk

Dari pernyataan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri meliputi :

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- b. Program Peningkatan ketahanan pangan
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Pertanian
- e. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- f. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- g. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- i. Program Peningkatan Kesejahteraan Petaku Usaha Peternakan
- j. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- k. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- l. Program Pengendalian dan Peningkatan Sectors Pertanian
- m. Program Pertanian usaha Petani
- n. Program Penguatan Pertanian
- o. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

selanjutnya

1.1.1.1. Isi Isi Strategic Nasional Provinsi Dan Daerah

Pada Pemerintah pusat, urusan Pertanian dan Urusan Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, begitu juga pada tingkatan Provinsi urusan pertanian dan urusan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur.



Pertumbuhan Revisi dan OPD Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Kota Medan berdasarkan Survei Results Kementerian Pertanian, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur, serta RPMD Kota Medan 2019-2024. Alasan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Perancangannya dijabarkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Pertumbuhan Revisi dan OPD berdasarkan Survei Results Kementerian Pertanian dan Pendorong Keberhasilan Perancangannya

No	Aspek yang Diteliti	Kategori	Pertumbuhan		
			Revisi	Proyeksi	Peningkatan
1	2	3	4	5	6
1	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD
2	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD	Revisi dan OPD

Selain hal lain tersebut di atas Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian juga memiliki sejumlah faktor penghambat dan pendorong yaitu :

Faktor Penghambat

1. penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian;
2. terbatasnya akses layanan keuangan pemodal;
- 3.inggipnya ahli fungsi lahan;
4. lahan yang tidak dapat diprodus;
5. Pemahaman yang kurang pada masyarakat tentang pola B2SA;
6. Penyakit ternak yang kian variatif

Faktor pendorong

1. terbateanya infrastruktur penunjang pertanian;
2. lemahnya ahli teknologi pertanian, pemerintah dan pertanian;
3. panjangnya mata rantai tata niaga pertanian;
4. lemahnya SOP petani yang belum berorientasi pasar;
5. kurangnya pengawalan terhadap obat, pupuk kimia dan produk peternakan;
6. Sumbahnya ahli dan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pangan memberikan manfaat ketahanan pangan

3.5. Perencanaan Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses perencanaan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan benak strategi meningkatkan akseptabilitas proses pembangunan, dapat dipersonalisasi dan secara rasul dan nilai berakibat dapat diertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada masalah dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak tidak isolatif.

Isu strategis merupakan salah satu penyusun analisis lingkungan internal terhadap proses perencanaan. Jika diemika eksternal, khususnya



selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyesuaikan diri secara cepat akan bisa diragukannya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Seu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikecualikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi semua (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang terjadi itu strategi adalah keadaan yang apabila tidak ditanggapi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal bisa dimanfaatkan, akan menghadirkan peluang untuk meningkatkan kesempatan masyarakat dalam jangka panjang. Akibatnya suatu itu strategi adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, menesak, bersifat kolektif/korporatif/organisasi dan memerlukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi itu strategi dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan ancaman internasional, nasional, dan provinsi. Sedangkan sisi internal terkait dengan ancaman di kota Medan yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. PANGAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Ketersediaan pangan tentunya menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah mengingat terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki Kota Medan dan meningkatnya ahli fungsi lahan untuk kegiatan non-pertanian. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut:

- Diidentifikasi sumber pangan lokal masih masih terbatas
- Peningkatan ahli pangan masyarakat memasyarakatkan lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal
- Masih rendahnya kapasitas SDM petakubetan pemerintah pangan sebagai salah satu potensi kapasitas sumber lahan pangan
- Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas penyuluh/penerjemah pengetahuan pangan dan gizi untuk



menyorong peningkatan kapasitas petani usaha pertanian pangan

2. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan usaha kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan
- Masih terbukanya SOP, pemukiman, dan infrastruktur di wilayah perikanan dan industri perikanan
- Masih terbukanya penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal) di Kota Medan
- Tingginya harga pakan ikan tidak seiring harga jual ikan yang tinggi pula

3. PERTANIAN

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan usaha pertanian adalah sebagai berikut :

- Ketersediaan lahan untuk pengembangan sektor pertanian di Kota Medan mengingat wilayah kota yang kecil
- Tingginya nilai fungsi lahan sektor pertanian menjadi ran pertanian dan pemukiman penduduk
- Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern
- Masih rendahnya kapasitas SOP petani dalam meningkatkan produksi
- Kebutuhan layanan pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah sangat terbatas
- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian seperti irigasi
- Ketersediaan lahan petani terhadap pemukiman yang berkelanjutan
- Petani belum mendapatkan keuntungan yang baik mengingat panjangnya tata niaga produk pertanian
- Generasi muda yang tidak tertarik di sektor pertanian
- SOP petani di dominasi oleh para petani yang sudah tua



- Terjadinya fluktuasi nilai yang tidak menentu yang sangat memengaruhi kerugian bagi petani
- Usaha pertanian belum dilakukan dengan intensif (hasil menggunakan cara tradisional dan tenak tidak ditingkatkan) dan belum menerapkan teknologi terbaru dalam bidang pertanian
- Harga pakan ternak merupakan beban yang sangat berpengaruh pada biaya produksi
- Belum optimalnya penanganan produk hasil ternak yang ABUH (Amas, Sehat, Utuh dan Halal)
- Masih kurangnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya
- Kurangnya peralatan agribisnis dan kesehatan hewan
- Kurangnya tenaga petugas pemerintah tingkat untuk RPH
- Jumlah dokter hewan sangat terbatas

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan perikanan diarahkan ke dua strategi, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota Medan lima tahun kedepan yang berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Medan adalah Keajaiban masyarakat secara luas.

Tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat namun belum berkualitas khususnya pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dan prioritas pembangunan khususnya implementasi AEC tahun 2015 perlu peningkatan daya saing kota Medan, karena dengan adanya AEC maka aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal lebih bebas. Sehingga peningkatan daya saing adalah hal yang wajib dan strategis diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi perlu mewujudkan kualitas hidup masyarakat luas dengan cara lain pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Untuk memperoleh rumusan ke dua strategi diperlukan analisis terhadap berbagai permasalahan sebagaimana terdapat dalam tabel 3.1. Namun, tidak semua permasalahan dapat menjadi ke dua strategi, tetapi hanya permasalahan yang memiliki dampak signifikan yang perlu dan dapat diwujudkan.



Dari analisa tersebut, maka rumusan isu strategi yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut pemecahan dalam kurun waktu 3 (lima) tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut, khususnya untuk isu lokal/ regional:

1. Bidang Urusan Pangan

Isu strategi urusan Pangan yaitu Penerapan konsumsi pangan secara GUSA (Beragam, Seimbang, Sehat dan Aman) belum optimal.

2. Bidang Urusan Pertanian

Isu strategi urusan Pertanian yang meliputi Pertanian dan Perikanan yaitu Inovasi Sistem Pertanian termasuk Perikanan dan Aquakultur Modern (Teknologi produksi, pengolahan, MP3A / Unit Pelayaran Jasa Alat Mesin Pertanian dan Pemukiman) belum optimal.

3. Bidang Urusan Perikanan

Isu strategi urusan Perikanan yaitu Inovasi Sistem Perikanan (Teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran) belum optimal.





BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menanggapi isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-lokal yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah diukur, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam satu waktu periode 5 (lima) tahun keperguruan Kopda Daerah terpilih. Pernyataan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tujuan dan target Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan Kota Medan atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mewujudkan pelaksanaan misi, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan serta penjabaran sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung Tujuan Pemerintah Kota Medan yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Berkeadilan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat serta Tujuan Pemerintah Kota Medan yaitu Pengurangan Kemiskinan, maka dapat ditetapkan tujuan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Periode 2019-2024 sebagai berikut :

- Terwujudnya Ketahanan Pangan yang mandiri melalui :
 1. Peningkatan akses pangan dan diversifikasi pangan masyarakat
 2. Peningkatan kompetensi petani usaha Perikanan
 3. Peningkatan kompetensi petani
 4. Peningkatan kompetensi pelaku usaha Peternakan
 5. Peningkatan nilai Sistem Akuntansi Standar Pemerintah (SAATP) Perangkat Daerah
 6. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



Berikut ini tabel matriks tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator ketercapaian masing-masing dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	LRAA	RAMD	LRAA	RAMD	INDIKATOR	SASARAN SIKIP 2024	TARUW				
	LRAA	RAMD	LRAA	RAMD			2022	2023	2023	2023	2024
1	Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah (Pelayanan Publik)		Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah (Pelayanan Publik)		Ukur Pokok Kinerja (KPI)	95,4	95,4	95,0	95,0	95,7	95,0
2	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik (Pelayanan Publik)		Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik (Pelayanan Publik)		Ukur Pokok Kinerja (KPI)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
					Ukur Pokok Kinerja (KPI)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
					Ukur Pokok Kinerja (KPI)	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0



PERUBAHAN RENCANA 2019-2024

Tujuan RKA : Meningkatkan Perencanaan Kesejahteraan dan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Kesatuan RKA : Program-program Kombinasi

No	TUNJUK DPO		INDIKATOR DPO		INDIKATOR	SALDO DI AWAL 2019	TARUHAN				
	2019	2020	2019	2020			2020	2021	2022	2023	2024
1		Meningkatkan kemampuan warga desa/kelurahan			Indeks Ketahanan Pangan	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34	82,34
				Meningkatkan akses pangan dan gizi/kehidupan pangan masyarakat	Salah Satu Pangan Bergizi	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8
				Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Perikanan	Rasio produksi ikan/akuakultur perikanan dengan daya produktif	1,1	1,1	1,1	1,15	1,1	1,15
				Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatkan Produktivitas Perikanan (TMTG) Rasio Produktivitas Perikanan dengan Daya Produktif	-	1,15 100/90	1,21 100/85	1 100/90	-	-
				Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Perikanan	Rasio Produksi Perikanan Perikanan dengan daya produktif	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,20
				Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Perikanan	Rasio Produksi Perikanan Perikanan dengan daya produktif	1,1	1,1	1,11	1,14	1,15	1,15
				Meningkatkan kemampuan pemerintah desa/kelurahan	Indeks Ketahanan Masyarakat Persejahteraan Desa	18,30	18,31	18,31	18,31	18,31	18,31
				Meningkatkan kualitas pelayanan desa/kelurahan	Nilai SAKIP persejahteraan desa	-	-	-	94,00 80	-	-



Provinsi Kalimantan Barat
Kantor Gubernur
Jl. Diponegoro No. 100, Pontianak, Kalimantan Barat 78000

Tel. (0561) 821111

Fax (0561) 821111



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Rencara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bag sebagai program prioritas RPMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan konseptual tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja internal. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan memfasilitasi layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan

dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapabilitas tim/kras, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 5. 1. Rincian Misi, Visi, Tujuan, Strategi dan Aksi Kegiatan

No	Tujuan Lama	Visi Baru	Strategi Baru	Aksi Kegiatan Baru
Misi BP3MD : Meningkatkan dan memantapkan tingkat kecakapan masyarakat				
1	Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya profesional	Meningkatkan sumber daya manusia khususnya profesional	Meningkatkan kecakapan sumber daya	Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat
Uraian Kelembagaan Program dan Perbaikan Hasil Mulaiah				
1	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan ketahanan sumberdaya manusia, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam peningkatan kualitas ketahanan pangan	Meningkatkan ketahanan sumber daya dan ketahanan pangan masyarakat
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada aspek pertanian, perikanan dan peternakan	1. Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatkan sistem pertanian modern, intensifikasi dan optimalisasi lahan pertanian serta penerapan berbagai teknologi pertanian	Mengembangkan sistem pertanian modern, intensifikasi dan optimalisasi dan diversifikasi, penerapan berbagai teknologi pertanian dan perikanan
			Meningkatkan peran dan fungsi desa/kelurahan	Pembangunan desa/kelurahan yang lebih mandiri, efisien, efektif dan produktif
			Meningkatkan pemerataan produksi dalam program PTET serta peningkatan kesejahteraan petani	Membangun pemerataan produksi pertanian dengan upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi berbasis pertanian dan peternakan
			Meningkatkan kemampuan usaha dan	Mengembangkan kemampuan dan penguasaan hasil produksi pertanian
			Meningkatkan produktivitas pertanian	
			Meningkatkan mutu dan keamanan hasil produksi	
			Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dalam arti luas	



			Mengajukan produk bernilai strategis (tahu, kopi, bawang putih, minyak, gula dan margarin)	Programan pengaplikasian dan pemasaran
			Mengaplikasikan program pengendalian biaya produksi	Programan (LPM) dan pemasaran ke pasar sasaran industri/retailer
			Mengajukan alternatif baru sumber tenaga dan kebudayaan yang bermanfaat	Mengajukan nilai tambah layanan tenaga
			Mengajukan daya yang rendah / alternatif baru	Mengajukan programan dan aplikasi untuk layanan tenaga dan industri
			Mengajukan aplikasi dan jeda/efisiensi dengan menggunakan aplikasi (TMS)	Mengajukan aplikasi TMS dan aplikasi lainnya
			Mengajukan bentuk pengemasan dan kemasan terpadu dan alternatif untuk kebutuhan pasar	Mengajukan programan dan aplikasi untuk kemasan
			Mengajukan bentuk kebudayaan terpadu dan alternatif untuk kebutuhan pasar	Mengajukan bentuk baru dan inovasi alternatif untuk kebutuhan pasar
			Mengajukan kualitas dan daya yang rendah layanan tenaga dan kebudayaan	Mengembangkan strategi alternatif pemasaran kebudayaan
				Mengembangkan teknologi aplikasi layanan tenaga dan kebudayaan di dalam LPM (LPM) layanan (Kas, Cook, Kas, Katering, Kas, Pemasaran, Kas, Ruang, Kas, Kasir dan lain)
No	Tujuan	Respon	Strategi	Arah Pengejaran
Dasar Peningkatan Produktif Jasa Tahan				
1	Mengajukan perkembangan PMS dan layanan pelanggan	2. Mengajukan nilai tambah alternatif dan proses pekerjaan	Mengajukan perkembangan produktivitas serta nilai tambah alternatif dan proses pekerjaan	Mengajukan programan-gaji layanan produktif alternatif



				Menggunakan alat bantu visual hasil kerja yang dibuat dan cara penyajian ulang
				Menggunakan media visual pertemuan yang menarik Materi Mempertah dan memelihara standar nasional Mempertah standar dan meningkatkan mutu
		1. Meningkatkan kemampuan secara menyeluruh	Meningkatkan wawasan serta meningkatkan daya, kemampuan dan sikap	meningkatkan kemampuan pelayanan

No	Tujuan	Isi	Strategi	Alat Bantu
----	--------	-----	----------	------------

Daftar Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Kerja Sama

1	Meningkatkan pertumbuhan PDB dan tingkat perbaikan	Meningkatnya dan jumlah nilai tambah perbaikan	Menggunakan prosedur perbaikan kualitas	Menggunakan prosedur perbaikan kualitas di Jawa Timur
			Menggunakan prosedur perbaikan layanan	Menggunakan prosedur perbaikan layanan di Jawa Timur
			Menggunakan prosedur standar dan sistem pasar	Menggunakan alat bantu untuk perbaikan dan perbaikan
			Menggunakan pertumbuhan ruang dan inovasi strategi tingkat yang	Menggunakan pertumbuhan ruang dan inovasi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan strategi yang standar dan perbaikan
			Menggunakan prosedur prosedur mutu dan pengembangan prosedur mutu	Menggunakan prosedur mutu perbaikan yang berkualitas mutu
			Menggunakan prosedur prosedur mutu dan prosedur mutu	Menggunakan prosedur mutu mutu perbaikan dan Jawa Timur
			Menggunakan prosedur prosedur mutu dan prosedur mutu	Menggunakan prosedur mutu mutu yang standar perbaikan dan dan perbaikan



			Meningkatkan kemampuan pribadi untuk bekerja melakukan dan memberikan	Meningkatkan kemampuan untuk bekerja sendiri dengan cara meningkatkan kemampuan dan profesional di kelas
			Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal melakukan dan memberikan	Meningkatkan kemampuan untuk bisa bekerja dan memberikan
			Meningkatkan kemampuan profesional melakukan dan memberikan	Meningkatkan kemampuan profesional melakukan dan memberikan di kelas
			Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan ASN	Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan ASN kelas belajar dan bekerja

Tabel 9. 2. Rencana Pembelajaran (RP), RPS, Tujuan, Strategi dan Aspek Keterampilan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Berprestasi Berkeadilan Melalui Masyarakat Sejauhmana				
Misi : Meningkatkan Kemampuan Diri dan Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kita Melalui				
NO	TUJUAN BAHU	SARAN BAHU	STRATEGI BAHU	ASPEK KETERAMPILAN BAHU
1	Meningkatkan kemampuan pribadi yang mandiri			
2		Meningkatkan kemampuan interpersonal dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi	Meningkatkan kemampuan interpersonal dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi	Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi
				Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi
				Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi
				Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi
				Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi
3		Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal melalui kelas belajar	Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi	Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi
				Meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan cara meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan komunikasi dengan ASN, meningkatkan kemampuan komunikasi



			Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap di zona Timur
			Meningkatkan produksi udang dan ikan air tawar	Meningkatkan nilai tambah produk budidaya dan perikanan
			Meningkatkan perikanan tangkap laut untuk zona dengan lingkungan hidup yang	Meningkatkan perikanan tangkap laut untuk kawasan dengan nilai tambah yang berkembang dengan perikanan budidaya dan perikanan
			Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produksi hasil perikanan	Meningkatkan produksi hasil perikanan yang berkualitas mutu
			Meningkatkan produksi hasil budidaya perikanan dan laut	Meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan ikan zona Timur
			Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	Meningkatkan jumlah ikan budidaya yang memiliki kualitas tinggi dan lingkungan
			Meningkatkan pengalihan usaha usaha budidaya ikan air tawar dan perikanan	Meningkatkan pelayanan untuk usaha budidaya ikan air tawar di zona Timur
			Meningkatkan hasil penelitian penelitian budidaya ikan perikanan	Meningkatkan jumlah ikan budidaya dan perikanan
			Meningkatkan pelayanan perikanan perikanan perikanan	Meningkatkan pelayanan perikanan perikanan di zona Timur
			Meningkatkan kualitas mutu perikanan	Meningkatkan kualitas mutu perikanan dan perikanan



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab vi diuraikan tentang Indikator rencana program prioritas Dinas KotaHarau Pangan dan Pertanian Kota Padang terkait dengan tujuan, sasaran dan program kegiatan dari setiap urusan yang berada di bawah Dinas KotaHarau Pangan dan Pertanian Kota Padang sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Sedangkan program-program tersebut langsung dengan pencapaian pelayanan dasar masyarakat dalam rangka untuk pemerataan pelayanan DPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikator adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan dari jumlah anggaran untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah diuraikan kebutuhan pendanaan atau pagu indikator selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi DPD dalam penyusunan Rencana Strategi DPD, termasuk dalam mengaturnya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada akhirnya, kebutuhan anggaran pembiayaan di DPD termasuk pada pembiayaan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahunan berupa dokumen Perubahan Rencana Strategi DPD (Rencana DPD), maupun rencana pembangunan tahunan DPD berupa Perubahan Rencana Kerja DPD (Rencana KPD). Perencanaan program prioritas dalam

dokumen Rencana yang telah dirumuskan ini, selanjutnya dijadikan sebagai landasan bagi untuk perumusan kebijakan dan rujukan utama dalam penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan tahunan daerah di Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan.

Kelompok program yang masuk prioritas utama merupakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran III dan IIIA Kepala daerah dan target sasaran prioritas nasional yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah Terpilih dan program-program prioritas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai DPD. Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pemerintahan dari masing-masing DPD di Kota Medan. Kelompok program prioritas kedua ini akan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan terwujudnya target utama program-program prioritas utama. Berikut ini program-program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5. 1. Kelompok Program Prioritas

URUTAN	RUANG LINGKUP	KELOMPOK PROGRAM POKOK/ POKOK-POKOK	PROGRAM UTAMA/ PROGRAM POKOK/ PROGRAM POKOK-POKOK DI TAHUN 2018 DAN KEMUNDUKAN (2019-2020/2021)
A. Utama	Kelautan Perikanan	1. Program Pengoptimalan Efisiensi dan Efektifitas Target Prioritas	1. Program Pengoptimalan Efisiensi dan Efektifitas Target Prioritas 2. Program Pengoptimalan Efektifitas Target 3. Program Pengoptimalan Efektifitas Target
B. Utama	Perikanan, Perikanan dan Kesehatan Ikan	1. Program Pengoptimalan Produk Perikanan/Perikanan 2. Program Pengoptimalan Produk dan Perikanan dan Perikanan Kesehatan Ikan	1. Program Pengoptimalan dan Pengembangan Usaha Perikanan 2. Program Pengoptimalan dan Pengembangan Usaha Perikanan 3. Program Pengoptimalan Kesehatan Ikan dan Perikanan Kesehatan Ikan 4. Program Pengoptimalan dan Pengembangan Usaha Perikanan 5. Program Pengoptimalan Usaha Perikanan 6. Program Pengoptimalan Perikanan

URUTAN	BLOK/URUTAN	PROGRAM STRATEGIS/URUTAN PERANGI 12	PROGRAM STRATEGIS/URUTAN PERANGI/URUTAN 12 Tahun 2017 dan SEKOLAH/URUTAN 12000 (Maret 2017)
	1. Pendidikan dan Riset	1. Program Peningkatan Kualitas dan Penguatan Pemasaran Hasil Pertanian	1. Program Peningkatan Kualitas Hasil
			2. Program Penguatan Sumber Daya Manusia dan Pertanian 3. Program Peningkatan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Usaha teknis bidang rekayasa rencana program prioritas dan program rutin dalam menunjang pencapaian visi misi dan program kerja Pemerintah Daerah, beserta strategi pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagaimana tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Padang di bawah ini :

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN ROKA NASIONAL TAHUN 2019-2024**

Tabel 4. 2. Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kategori Program	Matriks Program (Kategori, Kegiatan, Subkegiatan dan Output)					Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Program dan Kegiatan (Miliar Rupiah)												Mendukung Program dan Kegiatan Lainnya (Miliar Rupiah)			
					Subkegiatan		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kategori	Kegiatan				
	Program	Kategori	Kegiatan	Subkegiatan			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokas	Kategori Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokas	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokas	Subkegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokas	Output Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokas	Indikator Kinerja Utama Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Legal Billing Program and Strategy Rollback

Phase	Phase 1: Initial Assessment & Planning				Phase 2: Data Collection & Analysis	Phase 3: Rollback Strategy & Implementation								
	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4		Task 3.1	Task 3.2	Task 3.3	Task 3.4	Task 3.5	Task 3.6	Task 3.7	Task 3.8	
Phase 1	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 2	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 3	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 4	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 5	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 6	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 7	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 8	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 9	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10
Phase 10	Task 1.1	Task 1.2	Task 1.3	Task 1.4	Task 2.1	Task 2.2	Task 2.3	Task 2.4	Task 2.5	Task 2.6	Task 2.7	Task 2.8	Task 2.9	Task 2.10



Expanding Program for Energy Assessment

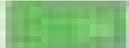
Project	Project Description, Location, Type, etc.				Priority	Energy Assessment								Total Energy Use	
						2010		2011		2012		2013		Total	Change
						Start	End	Start	End	Start	End	Start	End		
1															
2															
3															
4															
5															



Project	Project Description				Priority	Project Funding Program and Budget Overview								Total Project Cost			
	Project Name					Funding Source		Fiscal Year 2024		Fiscal Year 2025		Fiscal Year 2026		Fiscal Year 2027		Total	Percentage
	Code	Start	End	Status		Source	Amount	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End		
1	101	2024-01-01	2024-12-31	Active	Federal	1000000	2025-01-01	2025-12-31	2026-01-01	2026-12-31	2027-01-01	2027-12-31	2028-01-01	2028-12-31	3000000	33.33%	
2	102	2024-01-01	2024-12-31	Active	State	500000	2025-01-01	2025-12-31	2026-01-01	2026-12-31	2027-01-01	2027-12-31	2028-01-01	2028-12-31	1500000	16.67%	
3	103	2024-01-01	2024-12-31	Active	Local	250000	2025-01-01	2025-12-31	2026-01-01	2026-12-31	2027-01-01	2027-12-31	2028-01-01	2028-12-31	750000	8.33%	
4	104	2024-01-01	2024-12-31	Active	Private	1500000	2025-01-01	2025-12-31	2026-01-01	2026-12-31	2027-01-01	2027-12-31	2028-01-01	2028-12-31	4500000	50.00%	
5	105	2024-01-01	2024-12-31	Active	Other	750000	2025-01-01	2025-12-31	2026-01-01	2026-12-31	2027-01-01	2027-12-31	2028-01-01	2028-12-31	2250000	25.00%	



Project Name	Project Budget Reported through Progress																
	Budget Breakdown (Actual vs. Budget)				Actual	Actual 2008		Actual 2009		Actual 2010		Actual 2011		Actual 2012		Actual 2013	
	Actual	Budget	Actual	Budget		Actual	Budget										
Project A	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project B	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project C	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project D	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project F	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project G	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project H	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project J	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project K	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project L	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project M	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project O	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project Q	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project R	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project S	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project T	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project U	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project W	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project Y	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Project Z	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Activity	Project Funding Program and Budget Overview															
	Activity Description (Location, Dates, etc.)					Activity ID	Fiscal Year 2023		Fiscal Year 2024		Fiscal Year 2025		Fiscal Year 2026		Total Budget	
	Start	End	Location	Notes	Q1		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Total
Activity 1	01/01/2023	03/31/2023	Location A	Activity 1 Description	001	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 2	04/01/2023	06/30/2023	Location B	Activity 2 Description	002	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 3	07/01/2023	09/30/2023	Location C	Activity 3 Description	003	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 4	10/01/2023	12/31/2023	Location D	Activity 4 Description	004	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 5	01/01/2024	03/31/2024	Location E	Activity 5 Description	005	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 6	04/01/2024	06/30/2024	Location F	Activity 6 Description	006	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 7	07/01/2024	09/30/2024	Location G	Activity 7 Description	007	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 8	10/01/2024	12/31/2024	Location H	Activity 8 Description	008	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 9	01/01/2025	03/31/2025	Location I	Activity 9 Description	009	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 10	04/01/2025	06/30/2025	Location J	Activity 10 Description	010	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 11	07/01/2025	09/30/2025	Location K	Activity 11 Description	011	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 12	10/01/2025	12/31/2025	Location L	Activity 12 Description	012	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 13	01/01/2026	03/31/2026	Location M	Activity 13 Description	013	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 14	04/01/2026	06/30/2026	Location N	Activity 14 Description	014	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 15	07/01/2026	09/30/2026	Location O	Activity 15 Description	015	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000
Activity 16	10/01/2026	12/31/2026	Location P	Activity 16 Description	016	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	4000



Local Water Program for Strategic Assessment

Program Area	Initiative Area & Program (Initiative, Program, Activity, or Project (and Output))				Priority	Funding Source		Funding (\$ Million)				Funding (\$ Million)			
	Initiative	Program	Activity	Project		Local	State	Fiscal Year 2018		Fiscal Year 2019		Fiscal Year 2020		Total	Notes
								Start	End	Start	End	Start	End		
Water Conservation	Water Conservation	Water Conservation	Water Conservation	Water Conservation	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1	1	1	1	1
						1	1	1	1	1	1	1	1	1	



Project	Project Budget Progress and Financial Summary																		
	Budget Details				Actuals	Period 1 (2023)				Period 2 (2023)				Period 3 (2023)				Total Budget	
	Item	Code	Unit	Rate		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Remaining
Project A																			
Project B																			



Project ID	Capital Budget Program Performance Summary																
	Project Description				Status	Fiscal Year 2023		Fiscal Year 2024		Fiscal Year 2025		Fiscal Year 2026		Total Budget		Actual Spend	
	Code	Name	Location	Start Date		Est.	Act.	Est.	Act.	Est.	Act.	Est.	Act.	Est.	Act.	Est.	Act.
001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
001	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
002	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
003	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
004	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	



High Energy Program and Average Performance

Activity Name	Activity Description (Detailed)				Activity ID	Activity Status		High Energy Program and Average Performance								Activity Summary	
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4		Start Date	End Date	Phase 1 (2023)		Phase 2 (2023)		Phase 3 (2023)		Phase 4 (2023)		Total	Average (%)
								Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target	Actual	Target		
Activity 1					001	2023-01-01	2023-03-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 2					002	2023-04-01	2023-06-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 3					003	2023-07-01	2023-09-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 4					004	2023-10-01	2023-12-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 5					005	2023-01-01	2023-03-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 6					006	2023-04-01	2023-06-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 7					007	2023-07-01	2023-09-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 8					008	2023-10-01	2023-12-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 9					009	2023-01-01	2023-03-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 10					010	2023-04-01	2023-06-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 11					011	2023-07-01	2023-09-30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Activity 12					012	2023-10-01	2023-12-31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Reporting Program and Activity Expenses

FUNDING SOURCE	Activity Name (Agency/Program, Agency/Division, or Project/Activity Name)				FUNDING SOURCE	Reporting Period		Fiscal Year 2014				Fiscal Year 2015					
	Agency/Program	Agency/Division	Project/Activity	Start Date		End Date	Q1		Q2		Q3		Q4		Total	Total	
							Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget	Actual	Budget			

Appendix 2: Proposed 2023 Budget Summary

Category	2022 Actuals				2023 Proposed	2023 Proposed									
	Jan	Feb	Mar	Total		Jan	Feb	Mar	Total	Jan	Feb	Mar	Total	Jan	Feb
Administrative	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100
Programs	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200
Capital	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50
Reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	350	350	350	1050	350	350	350	1050	350	350	350	1050	350	350	350



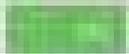
Activity	Total Annual Budget for Program Activities															
	Fiscal Year 2010				Fiscal Year 2011	Fiscal Year 2012		Fiscal Year 2013		Fiscal Year 2014		Fiscal Year 2015		Fiscal Year 2016		
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
Activity 1																
Activity 2																
Activity 3																
Activity 4																
Activity 5																
Activity 6																
Activity 7																
Activity 8																
Activity 9																
Activity 10																



Project Name	Project Status Report (as of 31/03/2024)															
	Project Details				Project Manager	Financial Performance								Risk & Compliance		
	ID	Start Date	End Date	Phase		Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024	YTD 2024	Budget Variance	Actual Spend	Forecast	Remaining	Compliance Score	Audit Status
Project A	001	2023-01-01	2023-12-31	Completed	John Doe	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Project B	002	2023-03-15	2024-03-15	In Progress	Jane Smith	75%	80%	85%	90%	85%	10%	5%	5%	5%	95%	On Track
Project C	003	2023-06-01	2024-06-01	On Hold	Mike Johnson	20%	20%	20%	20%	20%	80%	80%	80%	80%	80%	At Risk
Project D	004	2023-09-01	2024-09-01	Planned	Sarah Lee	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Not Started
Project E	005	2023-11-01	2024-11-01	Initiated	David Kim	10%	10%	10%	10%	10%	90%	90%	90%	90%	90%	Minor Delay
Project F	006	2024-01-01	2025-01-01	Future	Emily White	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	On Hold
Project G	007	2024-02-01	2025-02-01	Future	Chris Brown	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	On Hold
Project H	008	2024-03-01	2025-03-01	Future	Alex Green	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	On Hold
Project I	009	2024-04-01	2025-04-01	Future	Mia Black	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	On Hold
Project J	010	2024-05-01	2025-05-01	Future	Noah Grey	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	On Hold



Project Name	High Value Program by Strategic Business																
	Business Unit & Program (Business, Program Group, or Market Unit Name)					Strategic Business	Year 1 (2020)		Year 2 (2021)		Year 3 (2022)		Year 4 (2023)		Total Budget (2020-2023)		
	BU	PG	Market	Program	Q1		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Project A	BU1	PG1	Market1	Program1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Project B	BU2	PG2	Market2	Program2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Project C	BU3	PG3	Market3	Program3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Project D	BU4	PG4	Market4	Program4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Project E	BU5	PG5	Market5	Program5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Project Title	Project Budget Program for Strategic Initiatives																	
	Activity Name (Project, Program, System, etc.)					Fiscal Year	Fiscal Year 2024		Fiscal Year 2025		Fiscal Year 2026		Fiscal Year 2027		Fiscal Year 2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD		Q1	Q2	Q3	Q4	YTD	Q1	Q2	Q3	Q4	YTD		
Project A																		
Project B																		
Project C																		
Project D																		
Project E																		
Project F																		
Project G																		
Project H																		
Project I																		
Project J																		



Legal Entity Reporting for Strategic Accounts

Reporting Period	Reporting Entity				Reporting Period	Reporting Period		Reporting Period				Reporting Period		
	Reporting Entity					Reporting Period		Reporting Period		Reporting Period		Reporting Period		
	Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
Q1 2023					Q1 2023									
Q2 2023					Q2 2023									
Q3 2023					Q3 2023									
Q4 2023					Q4 2023									
Q1 2024					Q1 2024									
Q2 2024					Q2 2024									
Q3 2024					Q3 2024									
Q4 2024					Q4 2024									



Legal Entity Reported by Strategic Partners

Entity	Entity Name				Entity Type	Entity Status		Entity Financials								Entity Other Data	
	Entity Name					Active	Inactive	2023		2022		2021		2020		Revenue	Profit
	Entity ID	Entity Name	Entity Address	Entity City		Y/N	Y/N	Revenue	Profit	Revenue	Profit	Revenue	Profit	Revenue	Profit	Revenue	Profit
Entity 1	Entity 1 Name	Entity 1 Address	Entity 1 City	Entity 1 Type	Y	N	1000000	100000	900000	90000	800000	80000	700000	70000	1000000	100000	
Entity 2	Entity 2 Name	Entity 2 Address	Entity 2 City	Entity 2 Type	Y	N	2000000	200000	1800000	180000	1600000	160000	1400000	140000	2000000	200000	
Entity 3	Entity 3 Name	Entity 3 Address	Entity 3 City	Entity 3 Type	Y	N	3000000	300000	2700000	270000	2400000	240000	2100000	210000	3000000	300000	
Entity 4	Entity 4 Name	Entity 4 Address	Entity 4 City	Entity 4 Type	Y	N	4000000	400000	3600000	360000	3200000	320000	2800000	280000	4000000	400000	
Entity 5	Entity 5 Name	Entity 5 Address	Entity 5 City	Entity 5 Type	Y	N	5000000	500000	4500000	450000	4000000	400000	3500000	350000	5000000	500000	
Entity 6	Entity 6 Name	Entity 6 Address	Entity 6 City	Entity 6 Type	Y	N	6000000	600000	5400000	540000	4800000	480000	4200000	420000	6000000	600000	
Entity 7	Entity 7 Name	Entity 7 Address	Entity 7 City	Entity 7 Type	Y	N	7000000	700000	6300000	630000	5600000	560000	4900000	490000	7000000	700000	
Entity 8	Entity 8 Name	Entity 8 Address	Entity 8 City	Entity 8 Type	Y	N	8000000	800000	7200000	720000	6400000	640000	5600000	560000	8000000	800000	
Entity 9	Entity 9 Name	Entity 9 Address	Entity 9 City	Entity 9 Type	Y	N	9000000	900000	8100000	810000	7200000	720000	6300000	630000	9000000	900000	
Entity 10	Entity 10 Name	Entity 10 Address	Entity 10 City	Entity 10 Type	Y	N	10000000	1000000	9000000	900000	8000000	800000	7000000	700000	10000000	1000000	



Project Name	Project Description (Location, Purpose, etc.)				Project Status	Project Status Progress (Percentage)												Overall Project Score (0-100)	
						Phase 1 (20%)		Phase 2 (20%)		Phase 3 (20%)		Phase 4 (20%)		Phase 5 (20%)					
						Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Score	Weight		
Project A	Project A Description				Active	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	85	10		
Project B	Project B Description				Completed	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Project C	Project C Description				On Hold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Project D	Project D Description				Planning	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	
Project E	Project E Description				Active	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	75	10		



Total Budget Request for Strategic Initiatives

Strategic Initiative	Initiative Description (Project Name, Budget Period, etc.)				Priority	Total Budget Request (in \$)								Total Budget Request (in \$)		
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4		Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Total	Grand Total	
						Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2			
1					High	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2					Medium	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3					Low	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4					High	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
5					Medium	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6					Low	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
7					High	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
8					Medium	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
9					Low	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
10					High	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Year	Project Name, Location, Sector, etc.				Priority	Project Status Progress (Percentage)										Total Budget (USD)	
						Phase 1 (2023)		Phase 2 (2023)		Phase 3 (2023)		Phase 4 (2023)		Phase 1 (2024)	Phase 2 (2024)		
						Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2				
2023					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2024					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2025					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2026					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2027					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2028					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2029					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2030					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



High School Program by Group/ Period

Program Year	Program Name (Student, Program Name, or Period ID Only)					Program Type	Total Enrollment		Female Enrollment		Male Enrollment		Total Enrollment		Total Enrollment	
	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																
46																
47																
48																
49																
50																



Activity	Activity Name (Number, Location, etc.)					Activity Type	Equipment Programmed Through Process										
					Activity ID		Phase 1 (2020)		Phase 2 (2021)		Phase 3 (2022)		Phase 4 (2023)		Phase 5 (2024)		
	Start	End	Start	End			Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	Start	End	
1						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	



Activity Code	Project Name: [Project Name]																
	Activity Description				Activity Type	Phase 1 (2024)		Phase 2 (2024)		Phase 3 (2024)		Phase 4 (2024)		Phase 5 (2024)		Total Budget (2024)	
	Code	Name	Start	End		Start	End	Start	End								
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000





DAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2018 – 2024 telah ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Rumusan indikator perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran-capaian RPJMD. Rumusan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 2. 1. Indikator Kinerja Substansi Program dan Pertumbuhan Nilai Madrasah yang Mengukur pada Tujuan dan Sasaran SPMPD

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	KONSESI ANALISIS	TAHUN					KONSESI KINERJA PADA PERIODE 2019-2024
	LAMA	BARU	LAMA	BARU			2019	2021	2022	2023	2024	
1	Peningkatan Kualitas Program Pendidikan (Diciptakan Program Baru)		Peningkatnya Indikator Program Pendidikan (Diciptakan Program Baru)		Nilai Nilai Program Program	95,4	95,4	95,5	95,4	95,7	95,8	95,8
2	Peningkatan Keaktifan Masyarakat dalam usaha bersama, peningkatan dan perhatian		Peningkatnya Keaktifan masyarakat		Peningkatan Keaktifan masyarakat	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,24	1,24
					Nilai peningkatan jumlah usaha bersama dengan target tahunan	1,20	1,20	1,20	1,21	1,24	1,21	1,21
					Nilai peningkatan jumlah usaha bersama dengan target tahunan	0	1,1	1,2	1,20	1,2	1,20	1,20



PERUBAHAN RENCANA 2019-2024

Tujuan Rata : Meningkatkan Persebaran Kegiatan dan Substansi Kegiatan pada Kecamatan

Sasaran Rata : Peningkatan Jumlah

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2019	TARUN					KONDISI AKHIR PADA AKHIR PERIODE RPJMD
	LAMA	BARU	LAMA	BARU			2019	2021	2023	2025	2024	
1		Peningkatan Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan			Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	61,04	61,04	61,74	62,44	63,14	63,84	64,54
				Peningkatan jumlah kegiatan dan substansi kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	61,4	61,4	62,1	62,8	63,5	64,2	64,9
					Persentase Angka Keseluruhan Program (%)	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Terpadu (%)	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase Pelaksanaan kegiatan (Penyusunan Anggaran Kerja) yang sesuai (Rencana)	100	100	100	100	100	100	100



					Penelitian kualitatif menggunakan data sumber sekunder berupa artikel-jurnal-jurnal dan laporan-laporan		ada	ada	ada	ada	ada	ada
					Penelitian dengan studi dan kajian kritis		ada	ada	ada	ada	ada	ada
					Penelitian dengan menggunakan data artikel-jurnal-jurnal		ada	ada	ada	ada	ada	ada
					Penelitian dengan menggunakan wawancara dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat penting		ada	ada	ada	ada	ada	ada
					Penelitian yang menggunakan dan menganalisis jurnal			1	1	1	1	1

				Terlengkapya anggaran pangan		100	100	100	100	100	100
				Terlengkapya anggaran pangan pada tingkat tingkat desa pangan		100	100	100	100	100	100
				Terlengkapya anggaran anggaran pangan desa		100	100	100	100	100	100
			Peringkatnya kecepatan Pusat Data Persepsi	Kategori pencapaian setelah usaha pencapaian target hasil produksi	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,2
				jumlah total produksi perikanan lautnya (ton)	274,2	275,3	277	280	282	285	288
				Produktifitas Pakan Ikan (kg/budidaya)	21,4	21,5	21,6	22	22,1	22,2	22,3
				jumlah total produksi perikanan darat (ton)				20	20	20	20

					Jumlah Total Anggota Perwakilan (Tanggung Jawab Nasional) Bersama-sama (jumlah tidak ada data 2019)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
					Jumlah wakil tetap negara yang melakukan penelitian pada 2019	-	470	470	470	470	470	470
					Perwakilan tetap Perwakilan Non-PPK Kementerian	-	Total ada	Total ada	Total ada	Total ada	Total ada	Total ada
					Jumlah dan Jumlah Perwakilan (SAP) di Masing-masing perwakilan tetap yang bertugas dalam 5 (lima) Daerah Kecamatan atau yang setaranya	-	Total ada	Total ada	Total ada	Total ada	Total ada	Total ada



						2016	2017	2018	2019	2020	2021
				jumlah persentase dari nilai investasi langsung perusahaan (jumlah persentase dari penanaman modal langsung asing) (juta dolar Amerika Serikat)	-	100,00%	0	100	100	100	100
				jumlah nilai investasi di luar dari nilai investasi langsung	-	437.400.000	437.400.000	437.400.000	437.400.000	437.400.000	437.400.000
				Persentase Peringkat Produk perikanan	-	-	1%	-	-	-	1%
			Perencanaan Rancangan Perikanan Perairan	jenis Perikanan Perairan (air tawar, Perikanan Perairan)	-	-	1,1	1,11	1,11	1,11	1,11
				jenis Perikanan Perairan (air tawar, Perikanan Perairan)	1,00	1,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
				jumlah Luas Perikanan (air tawar, Perikanan Perairan)	-	-	10	10	10	10	10
				jumlah Luas Perikanan (%)	-	-	10	10	10	10	10



							80	85	90	100	100	
							80	75	70	65	60	
							10	15	20	25	30	
							10	10	10	10	10	
						1,1 ton/ha	4,5 ton/ha	1,1 ton/ha	7 ton/ha	ton/ha	ton/ha	7 ton/ha
							10 jam	1	1	1	1	1
							1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	
							8	8	8	8	8	
							60,7%	60	60	60	60	



					Perubahan jumlah beban yang tidak terdapat secara kumulatif	-	-	5	10	15	20	25
					Perubahan jumlah pendapatan secara kumulatif	-	10,00%	10	10	10	10	10
				Perubahan Anggaran Pendapatan Pokok Daerah	1,2	1,1	1,21	1,209	1,211	1,213	1,215	
					Perubahan jumlah beban dan piutang yang harus yang harus	1	1	1	1	1	1	1
					Perubahan anggaran belanja dan jumlah yang harus	1	10,00%	10	10	10	10	10
				Perubahan nilai aset	10,00	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	

Tabel 7. 1. Rumus Perhitungan Biaya (RUMUSYA LAW)

No	SUDUTAN KERTAS	INSTRUMEN	KETERANGAN / PENJELASAN PERHITUNGAN	
1.	Perhitungan Kebutuhan Papan Mawarud	1. Dkt. Pda Papan Mawarud	Total Dkt PPH = $\frac{Dkt. Pda PPH}{100} \times 100$; 1 Kategori Papan	Total Dkt Pda Papan Mawarud (PPH) adalah jumlah dkt. pap. 1 kategori papan. Angka ini ditambah dkt. PPH konsumsi papan yang termasuk tingkat mawarud konsumsi papan. Rumus ketetapan konsumsi papan yang dimutakhirkan oleh DPR diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu kurang (Dkt. PPH < 80), sedang (Dkt. PPH 80-92), dan baik (Dkt. PPH > 92)
2.	Perhitungan Kebutuhan paku	1. Perhitungan Kebutuhan Paku (Dkt/Pda)	Tahun 1 - (Tahun 1 - 0) ----- x 100% Tahun 1 - 0 n = Tahun selang 0 = 1 = Tahun 1	Lembar ketetapan produksi antara Tahun selang dengan produksi Tahun 1 dan juga produksi Tahun 1 x n (100%)
		1. Biaya produksi paku udan perkiraan dengan biaya produksi	Produksi Paku Udah ----- x 100% Biaya Produksi	Perhitungan perkiraan pada produksi paku udah perkiraan dengan biaya produksi yang di ketahui dalam 1 Tahun dengan 100%
3.	Perhitungan Kebutuhan paku udah perkiraan	1. Biaya produksi paku udah perkiraan dengan biaya produksi	Produksi Paku Udah ----- x 100% Biaya Produksi	Perhitungan perkiraan pada produksi paku udah perkiraan dengan biaya produksi yang di ketahui dalam 1 Tahun dengan 100%

Tabel 2. 2. Indeks Perkembangan Kinerja (Perubahan 2023/24)

NO	TURAN (KPI)	INDIKATOR	INDIKATOR	RUMUS	KETERANGAN
1	Penyelesaian keluhan pengguna dengan cepat yang sesuai		Jumlah Keluhan yang Ditangani	$I = \sum_{i=1}^n K_i$ <ul style="list-style-type: none"> (K) Jumlah keluhan (n) Jumlah pengguna (K_i) Keluhan yang ditangani 	Jumlah keluhan yang Ditangani (DK) merupakan angka yang menunjukkan tingkat kelengkapan dengan cepat di suatu waktu
2	Penyelesaian oleh pengguna yang dapat diakses dengan cepat	Penyelesaian oleh pengguna yang dapat diakses dengan cepat	Nilai Total Pengunjung Pengguna	$I = \sum_{i=1}^n K_i$ <ul style="list-style-type: none"> (K) Jumlah (n) Jumlah pengguna (K_i) Jumlah pengguna yang ditangani 	Nilai Total Pengunjung Pengguna (TPP) adalah jumlah dari nilai TPP dari 1 sampai dengan pengguna. Angka ini merupakan nilai TPP di tingkat tertinggi yang menunjukkan tingkat kelengkapan layanan pengguna terhadap pengguna di suatu waktu. Rumus TPP yaitu: Nilai TPP = (K) x (n) = jumlah, Nilai TPP = (K) x (n) = jumlah, Nilai TPP = (K) x (n) = jumlah
3	Penyelesaian keluhan pengguna yang dapat diakses dengan cepat	Nilai penyelesaian oleh pengguna yang dapat diakses dengan cepat	Penyelesaian oleh pengguna yang dapat diakses dengan cepat	$I = \sum_{i=1}^n K_i$ <ul style="list-style-type: none"> (K) Jumlah (n) Jumlah pengguna (K_i) Jumlah pengguna yang ditangani 	Penyelesaian oleh pengguna yang dapat diakses dengan cepat merupakan angka yang menunjukkan tingkat kelengkapan layanan pengguna terhadap pengguna di suatu waktu

NO	TUMBUH UPT	JENIS KAWASAN	LAKSANA	BUNYI	PETERANGAN
1		Perumahan Perkotaan	<p>Area Perumahan Perkotaan dengan luas Perumahan</p> <p>Area perumahan untuk rumah permanen dengan luas perkarat</p>	<p>Perumahan Perkotaan</p> <p>Area Perumahan</p>	<p>Perumahan Perkotaan: pada perumahan untuk rumah permanen dengan luas perkarat yang di tentukan dalam 1 Tahun</p>
2		Perumahan Perkotaan	Area Perumahan Perkotaan Perumahan dengan luas perkarat	<p>Perumahan Perkotaan</p> <p>Area Perumahan</p>	<p>Perumahan Perkotaan: pada perumahan untuk rumah permanen dengan luas perkarat yang di tentukan dalam 1 Tahun</p>
3		Perumahan Perkotaan	Area Perumahan Perkotaan Perumahan dengan luas perkarat	<p>Perumahan Perkotaan</p> <p>Area Perumahan</p>	<p>Perumahan Perkotaan: pada perumahan untuk rumah permanen dengan luas perkarat yang di tentukan dalam 1 Tahun</p>
4		Perumahan Perkotaan	Area Perumahan Perkotaan Perumahan dengan luas perkarat	<p>Perumahan Perkotaan</p> <p>Area Perumahan</p>	<p>Perumahan Perkotaan: pada perumahan untuk rumah permanen dengan luas perkarat yang di tentukan dalam 1 Tahun</p>



BAB VIII PENUTUP

Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan tahun 2019-2024 disusun untuk meningkatkan penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian dan bidang Perikanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Medan terpilih yang telah ditetapkan dalam strategi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Medan tahun 2019-2024 dan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang (2019-2024), sasaran program dan kegiatan Pembangunan dalam Rencana ini telah dibedakan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan Ketahanan Pangan dan Pertanian yang lebih luas dan available untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kota Medan. Oleh karena itu Rencana ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan, serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPMD Kota Medan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus diberikan bentuk fisik dan kelompok sasaran dalam Rencana dan RKA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan merupakan Syarat yang paling tepat untuk mewujudkan Target Kinerja dalam Penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian dan bidang Perikanan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan yang telah dijabarkan dalam Rencana dan

IRA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan harus lebih ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan di masa yang akan datang.

Atasnya sampaikan dan semangat untuk semakin lebih bertumbuh dari semua pihak akan turut sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Medan.

Bagina Negeri, Bina Negeri Kami!

